



Kebijakan Pendidikan

Tim Penulis:

Dyan Pratiwi | Syalendra Putra | Yunitasari
Agwin Darwiyanti | Wencislaus Sirjon Nansi
Norbertus Tri Suswanto Saptadi | Blasius Perang
Rudi Purwana | Arif Bulan | Winda Novianti Sri Atin
Randitha Missouri | Kharisma Romadhon
Jeremias Leda | Mudatsir | Rico Setyo Nugroho
Giandari Maulani | Muhammad Alwi

Editor : Andri Cahyo Purnomo.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Dyan Pratiwi
Syalendra Putra
Yunitasari
Agwin Darwiyanti
Wencislaus Sirjon Nansi
Norbertus Tri Suswanto Saptadi
Blasius Perang
Rudi Purwana
Arif Bulan
Winda Novianti
Sri Atin
Randitha Missouri
Kharisma Romadhon
Jeremias Leda
Mudatsir
Rico Setyo Nugroho
Giandari Maulani
Muhammad Alwi**

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Tim Penulis:

Dyan Pratiwi
Syalendra Putra
Yunitasari
Agwin Darwiyanti
Wencislaus Sirjon Nansi
Norbertus Tri Suswanto Saptadi
Blasius Perang
Rudi Purwana
Arif Bulan
Winda Novianti Sri Atin
Randitha Missouri
Kharisma Romadhon
Jeremias Leda
Mudatsir
Rico Setyo Nugroho
Giandari Maulani
Muhammad Alwi

Editor : Andri Cahyo Purnomo. M.Pd., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 250
ISBN : 978-623-8385-59-1
Terbit Pada : April 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku yang berjudul “**Kebijakan Pendidikan**” ini. Pendidikan merupakan sebuah sistem kompleks yang membutuhkan sebuah kebijakan untuk mengaturnya agar proses berjalannya dapat terlaksana dengan sistematis. Kebijakan pendidikan yang tepat menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan maju dan berkembangnya kualitas pendidikan atau sebaliknya. Buku Kebijakan pendidikan ini mengelaborasi para pembaca untuk memahami lebih dalam tentang urgensi kebijakan dalam bidang pendidikan agar cita-cita pendidikan dapat terwujud dengan lebih optimal. Dalam buku ini pembaca tidak hanya disuguhkan tema kebijakan pendidikan dalam konteks konseptual saja, namun juga dilengkapi dengan berbagai topik dan isu-isu kebijakan pendidikan beserta detail *best practice* nya.

Dalam buku ini terdapat delapan belas bab. Bab pertama membahas tentang Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Kemudian di bab kedua dibahas tentang Isu-Isu Kebijakan Pendidikan. Bab ketiga membahas tentang Perumusan Kebijakan Pendidikan. Bab keempat berisi Implementasi Kebijakan Pendidikan dan bab kelima membahas tentang Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Pada bab enam dari buku ini membahas tentang Kebijakan Pendidikan Berkarakter Kebangsaan. Bab tujuh membahas tentang Kebijakan Pendidikan Inklusi. Bab delapan tentang Kebijakan Guru dan Dosen. Bab Sembilan berisi Kebijakan Kurikulum dan Buku Teks Pembelajaran. Bab sepuluh membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. Bab sebelas membahas tentang Kebijakan Program Wajib Belajar. Bab duabelas berisi topik Kebijakan Program Sekolah Gratis. Bab tigabelas

membahas tentang Kebijakan Pendidikan Berbasis Pesantren. Bab empatbelas berisi tema Kebijakan Beasiswa Pendidikan. Bab Limabelas membahas tentang Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar. Pada bab enambelas berisi tentang Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian di bab tujuh belas membahas Metode Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan. Pada bab terakhir dibahas tentang Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

Harapan penulis dengan terbitnya buku ini semoga dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam kajian kebijakan pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada penerbit PT Sada Kurnia Pustaka dalam memfasilitasi penulis untuk menerbitkan karya ini. Terimakasih pula kami haturkan atas saran dan sumbangan pemikiran rekan sejawat dalam penyusunan buku ini. Teruntuk para pembaca, semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan sebagai sumber keilmuan, aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN	1
Pendahuluan	1
Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan	2
Komponen Kebijakan Pendidikan	3
Karakteristik Kebijakan Pendidikan.....	5
Urgensi Kebijakan Pendidikan	5
Fase Penyusunan Kebijakan Pendidikan.....	6
Daftar Pustaka	8
Profil Penulis	9
BAB 2 ISU-ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN	10
Kebijakan Pendidikan.....	10
Aksesibilitas dan Kesetaraan Pendidikan	11
Kualitas Pendidikan.....	13
Teknologi Dalam Pendidikan	14
Kurikulum dan Pembelajaran Inovatif.....	15
Pendidikan Karakter	16
Peningkatan Keterampilan Vokasional	18
Pendidikan Inklusif.....	19
Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	20
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis	23
BAB 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	25
Model Perumusan Kebijakan	25
Langkah Merumuskan Kebijakan.....	33
Daftar Pustaka	35
Profil Penulis	37
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	38
Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan	38
Pentingnya Implementasi Kebijakan Pendidikan	42
Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan.....	43
<i>Stakeholders</i> Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	44

Studi Kasus dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia	48
Daftar Pustaka	51
Profil Penulis	53
BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH	54
Pendahuluan	54
Arah Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah	57
Peluang dan Tantangan Pendidikan di Era Otonomi Daerah ..	62
Strategi Kebijakan Terhadap Problem Pendidikan Di Era Otonomi Daerah	66
Kesimpulan	68
Daftar Pustaka	69
Profil Penulis	71
BAB 6 KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN	72
Pendahuluan	72
Kebijakan Pendidikan	74
Pendidikan Berkarakter	75
Karakter Kebangsaan	77
Menyongsong Bonus Demografi	78
Dinamika dan Tantangan	80
Penutup	82
Daftar Pustaka	83
Profil Penulis	85
BAB 7 PENDIDIKAN INKLUSI	86
Pendahuluan	86
Definisi Inklusi	87
Tujuan Pendidikan Inklusi	88
Ciri dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	90
Kebijakan Pendidikan Inklusi	92
Model dan Ketenagaan Dalam Sekolah Inklusi	92
Daftar Pustaka	96
Profil Penulis	98
BAB 8 KEBIJAKAN GURU DAN DOSEN	99
Kebijakan Guru dalam Konteks Pendidikan Kontemporer	99
Kebijakan Dosen dalam Pendidikan Tinggi: Membangun Kualitas Pembelajaran	103

Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	112
BAB 9 KEBIJAKAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS PEMBELAJARAN	113
.....	113
Pendahuluan	113
Definisi Kebijakan Kurikulum dan Buku Teks Pembelajaran	115
Peran Kebijakan dalam Membentuk Kurikulum dan Buku Teks	117
.....	117
Konsep Desain Kurikulum dan Buku Teks yang Efektif.....	118
Sejarah Perkembangan Kebijakan Kurikulum di Indonesia ...	119
Tren Global Dalam Kebijakan Kurikulum	121
Peran dan Karakteristik Buku Teks Pembelajaran di Indonesia	122
.....	122
Evaluasi Kualitas Buku Teks.....	123
Tantangan Dalam Pembuatan dan Penerapan Buku Teks.....	124
Daftar Pustaka.....	125
Profil Penulis.....	127
BAB 10 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU.....	128
Persiapan dan Perencanaan Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru	128
Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru	133
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	140
BAB 11 KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR.....	141
Urgensi Pemerataan Pendidikan.....	141
Program Wajib Belajar di Indonesia.....	142
Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis.....	155
BAB 12 KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS	156
Latar Belakang dan Sejarah Program Pendidikan Gratis	156
Tujuan dan Manfaat Program Pendidikan Gratis.....	160
Struktur, Implementasi, dan Peran Pemerintah dalam Program Pendidikan Gratis	162

Tantangan dan Hambatan Serta Kekurangan dan Kelebihan Program Pendidikan Gratis.....	164
Evaluasi dan Upaya Perbaikan Program Pendidikan Gratis...	166
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	170
BAB 13 KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN	171
Pendahuluan	171
Definisi Pesantren	172
Eksistensi Pesantren	174
Sekolah Berbasis Pesantren (SBP)	176
Kebijakan Pendidikan Terhadap Pesantren	177
Daftar Pustaka.....	181
Profil Penulis.....	184
BAB 14 KEBIJAKAN BEASISWA PENDIDIKAN.....	185
Pendahuluan	185
Program-program Beasiswa.....	187
Beasiswa Pemerintah Indonesia	188
Permasalahan Kebijakan Beasiswa.....	189
Peran Beasiswa Mewujudkan Pemerataan Pendidikan.....	191
Penutup	195
Daftar Pustaka.....	195
Profil Penulis.....	196
BAB 15 KEBIJAKAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR.....	197
Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar	197
Empat Pokok Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar	198
Kurikulum Merdeka Menciptakan Manajemen Unggulan	204
Daftar Pustaka.....	207
Profil Penulis.....	208
BAB 16 KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN..	209
Pendahuluan	209
Kebijakan Pendidikan Agama dari Masa ke Masa.....	210
Kebijakan Dalam Pendidikan Islam	215
Kebijakan Dalam Peradilan Agama Dari Masa ke Masa	219
Daftar Pustaka.....	223
Profil Penulis.....	225

BAB 17 METODE PENELITIAN DAN RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN	226
Konsep Dasar Metode Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan	226
Metode Penelitian Pendidikan	227
Riset Kebijakan Pendidikan dan Siklus Pengembangan Kebijakan	228
Implementasi dan Tujuan Kebijakan Pendidikan	230
Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan	231
Instrumen dan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan	232
Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan	232
Daftar Pustaka	235
Profil Penulis	236
BAB 18 MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	238
Pendahuluan	238
Konsep Dasar <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan	242
Tahapan-Tahapan Dalam Proses <i>Monitoring</i> Kebijakan Pendidikan	245
Tahapan-Tahapan Dalam Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan	246
Daftar Pustaka	248
Profil Penulis	250

BAB 1

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dyan Pratiwi, M.Pd.
IAIN Fattahul Muluk Papua

Pendahuluan

Pendidikan adalah sektor penting dalam kehidupan manusia. Melalui proses pendidikan, potensi-potensi baik yang dimiliki manusia diarahkan dan dikembangkan sehingga menjadi lebih optimal (Sujana, 2019). Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memberantas kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Melalui pendidikan pula pemerintah berupaya untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan warganya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa, maka pemerintah memberikan perhatian cukup serius dalam hal ini (Pristiwanti et al., 2022).

Pendidikan merupakan sebuah sistem kompleks yang membutuhkan sebuah kebijakan untuk mengaturnya agar proses berjalannya dapat terlaksana dengan sistematis. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya sebuah sistem pendidikan di sebuah negara (Aziz et al., 2020). Kebijakan pendidikan dijadikan dasar serta payung hukum yang memberikan arah serta kejelasan bagi pihak-pihak pengelola dan penyelenggara pendidikan dalam berbagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Rozak, 2021). Kebijakan pendidikan yang tepat menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pendidikan itu sendiri.

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Dilihat dari bahasa (etimologi), kata kebijakan (*policy*) diartikan sebagai sebuah ketentuan, politik, aturan, keputusan, undang-undang, atau rencana strategis. Kata kebijakan dalam Bahasa Yunani diterjemahkan dengan istilah *polis* yang berarti negara, sedangkan dalam bahasa latin, kebijakan dikenal dengan istilah *politia* yang memiliki arti politik (Arwildayanto et al., 2018). Jika dilihat secara bahasa maka makna kebijakan (*policy*) merujuk pada keputusan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki sifat umum yang ditujukan untuk masyarakat secara luas (Rozak, 2021).

Istilah Pendidikan secara etimologi berasal dari kata *paedagogie* dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai bimbingan kepada anak. Istilah pendidikan ini jika dilihat dari bahasa latin berasal dari kata *educare* yang bermakna sebuah upaya mengeluarkan sesuatu dari dalam (*bring out*). Sedangkan pendidikan jika dilihat dari bahasa Jawa memiliki arti *nggulowentah* yang bermakna mengolah, mengubah watak, pikiran, kemauan, dan kepribadian anak (Hidayat & Abdullah, 2019).

Dari uraian tersebut, secara etimologi, pendidikan dimaknai sebagai sebuah usaha untuk mengeluarkan berbagai potensi yang meliputi karakter, pemikiran, kemauan yang ada pada diri anak untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Dari masing-masing pemaknaan mengenai kata kebijakan dan pendidikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur dan mendasari upaya-upaya mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan masyarakat secara luas.

Jika dilihat secara terminologi, istilah kebijakan pendidikan memiliki beragam pemaknaan. Untuk lebih memahaminya berikut ini beberapa pendapat para pakar tentang makna dari kebijakan pendidikan (Arwildayanto et al., 2018):

1. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009)

Kebijakan pendidikan merupakan kesatuan praktik dan teori pendidikan yang mengarahkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan.

Perumusan kebijakan pendidikan, dilakukan oleh tim perumus kebijakan yang terdiri dari berbagai unsur. Tim perumus kebijakan tersebut antara lain terdiri dari politisi, pakar pendidikan, manajer dan administrator pendidikan, akademisi serta praktisi pendidikan. Ada beberapa tahapan atau fase dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan. Menurut Dunn (2004), berikut ini adalah rangkaian fase penyusunan kebijakan pendidikan (Giantara & Amiliya, 2021):

1. Penyusunan Agenda

Fase penyusunan agenda adalah tahapan di mana para tim yang telah dipilih untuk ikut andil merumuskan kebijakan pendidikan, diangkat dan berwenang menempatkan masalah pada agenda publik.

2. Formulasi Kebijakan

Pada tahap kedua ini, para tim kemudian merumuskan berbagai pilihan-pilihan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan yang telah masuk pada agenda publik sebelumnya.

3. Adopsi Kebijakan

Fase adopsi kebijakan ini adalah tahap pengambilan keputusan terhadap pilihan alternatif yang mendapat dukungan terbanyak (mayoritas) untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pada fase sebelumnya. Kebijakan pendidikan diuji coba untuk diterapkan, yang kemudian dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tersebut.

5. Penilaian Kebijakan

Di tahap penilaian kebijakan ini dilakukan berbagai pemeriksaan oleh beberapa pihak seperti eksekutif, legislatif, dan peradilan apakah kebijakan tersebut telah memenuhi syarat undang-undang untuk mencapai tujuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. CV Cendekia Press.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67–71. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29210/3003817000>.
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 86–96.
- Hidayat, R., & Abdullah. (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim (Journal of Islamic Education)*, 3(2), 197–208.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>

PROFIL PENULIS



Dyan Pratiwi, M.Pd.

Penulis adalah salah satu dosen di IAIN Fattahul Muluk Papua. Latar belakang pendidikan dari penulis adalah bidang Manajemen Pendidikan. Karya ini merupakan karya keempat yang penulis hasilkan bersama penerbit Sada Kurnia Pustaka dan berkolaborasi dengan beberapa penulis lainnya. Selain aktif dalam menulis *book chapter*, penulis juga memiliki pengalaman sebagai Ketua Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam di kampus IAIN Fattahul Muluk Papua. Selain itu, penulis juga merupakan *editor in chief* pada Jurnal Jumpis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam pada kampus yang sama. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan merupakan rambu-rambu yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan berbagai upaya sistematis agar mewujudkan kebijakan yang baik. Dari beberapa pengalaman penulis sebagai akademisi bidang manajemen pendidikan, penulis menyadari pentingnya sebuah kebijakan pendidikan untuk dibuat dan diimplementasikan dengan baik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk ikut andil dalam menulis *book chapter* dengan judul Kebijakan Pendidikan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi dan dapat memperkaya khasanah literasi pendidikan.

Email Penulis: dyan.compeer@gmail.com.

BAB 2

ISU-ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dr. Syalendra Putra, M.Pd.
SMA Negeri 1 Kota Bengkulu

Kebijakan Pendidikan

Salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan. Kualitas sistem pendidikan dapat berdampak langsung pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran supaya peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kenyataannya, pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional belum menghasilkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena proses kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak pernah *free value*, berbagai kepentingan seringkali mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Pada tingkat ini, kepentingan siswa, pendidik, dan masyarakat umum seringkali diabaikan, dan pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis ketika menentukan kebijakan pendidikan.

Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Masalah kekerasan dalam pendidikan di Indonesia merupakan isu serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Masalah kekerasan dalam pendidikan dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional siswa. Ini juga dapat menghambat akses dan partisipasi siswa dalam pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam pendidikan, diperlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk penerapan kebijakan yang melindungi hak-hak siswa, pelatihan guru dalam manajemen kelas yang positif, kampanye anti-*bullying*, pendidikan seksual yang inklusif, dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

Masalah perundungan (*bullying*) di dunia pendidikan merupakan salah satu isu yang menjadi perbincangan di dunia pendidikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Perundungan dapat menyebabkan dampak emosional yang serius bagi korban, termasuk kecemasan, depresi, dan mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional siswa secara signifikan (Widamar, dkk, 2023). Siswa yang menjadi korban perundungan seringkali mengalami gangguan belajar karena mereka sulit berkonsentrasi di sekolah dan merasa tidak aman dalam lingkungan belajar.

Ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai potensi akademik mereka. Perilaku perundungan cenderung berulang dan dapat menjadi siklus yang sulit untuk dihentikan. Siswa yang menjadi korban perundungan sering kali merasa terisolasi dan tidak mampu untuk melawan perilaku perundungan, yang dapat mengakibatkan peningkatan kasus perundungan di masa depan. Jika perilaku perundungan tidak ditangani secara tegas oleh pihak sekolah dan masyarakat, hal ini dapat menciptakan toleransi terhadap kekerasan di antara siswa. Ini dapat memperkuat budaya kekerasan dan membuat sulit untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, indikator iklim keamanan sekolah mengalami penurunan pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Dalam indeks iklim keselamatan sekolah, ditemukan tingkat SMP dan sederajat pada tahun ini turun 2,96 poin dari 68,25 poin pada tahun 2021 menjadi 65,29. Terjadi penurunan yang cukup besar pada level SMA sederajat dengan penurunan 5,09 poin menjadi 66,87 yang semula 71,96 pada tahun 2021. Penurunan skor keamanan berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 perlu ditanggapi serius oleh pemerintah. Adanya kekerasan yang dialami dan dilakukan oleh peserta didik dan pendidik menunjukkan bahwa pendidikan tidak berfungsi secara maksimal. Pemerintah harus mengawasi pembentukan tim pencegahan dan tanggap kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. (2010). PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama. *Al-Qanun*, 12(2).
- Duryat, D. H. M. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan; Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit K-Media.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Isma, A., Isma, A., Isma, A., & Isma, A. (2023). Peta Permasalahan Pendidikan Abad 21 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 11-28.
- Liriwati, F. Y. (2023). Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan untuk Membangun Pendidikan yang Relevan di Masa Depan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 62-71.
- Purba, A., & Saragih, A. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Digital. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(3), 43-52.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1-15.
- Sumitro, W., Kumkelo, M., & Kholish, M. A. (2014). *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Wibowo, N. (2016). Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Tuntutan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1), 45-59.
- Widamar, A. W., Pasaribu, M. J. S., Muslim, M. R. N., & Naf'an, M. A. (2023). Persoalan Perundungan di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).

PROFIL PENULIS



Dr. Syalendra Putra, M.Pd.

Lahir di Bengkulu, 17 Desember 1984 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Umar Usman, S.E (Alm) dan Nur'aini. Ia menempuh pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu pada tahun 2003 dan berhasil menjadi wisudawan terbaik. Pada tahun 2007 melanjutkan S2 Magister Administrasi Pendidikan Universitas Bengkulu dan kembali berhasil menjadi wisudawan terbaik.

Pendidikan S3 Doktor Pendidikan juga ia selesaikan pada tahun 2022 sebagai wisudawan terbaik. Ia memiliki istri bernama Yunitasari, M.Pd.Si kandidat Doktor yang saat ini bertugas di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, serta memiliki 2 orang anak yang saat ini bersekolah di SD Islam Al Azhar 51 Bengkulu yaitu Rafif Lazuardi Panindra dan Gaozhan Prasraya Qyradhan. Pada tahun 2008, Syalendra Putra ditugaskan sebagai guru matematika di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Berkat kegigihan dan kerja keras sebagai guru matematika serta inovasi pembelajaran yang telah dilakukan, tahun 2017 ia memperoleh Medali Emas sebagai Juara 1 Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Menengah Bidang Matematika di Tingkat Nasional.

Pada tahun 2018 ia kembali mengukir prestasi sebagai guru SMK Berprestasi ke 2 tingkat Nasional. Pria yang hobi membaca dan mendengarkan musik ini juga dilibatkan sebagai penulis Bank Soal Nasional Matematika SMK (Tahun 2018-2019), guru pendamping kurikulum 2013 (Tahun 2013), instruktur Kurikulum 2013 (Tahun 2018), instruktur pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS (Tahun 2019) dan berbagai kegiatan di bidang pendidikan lainnya. Akhirnya pada tahun 2019 ia dipercaya menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 6 Seluma hingga sekarang. Pada tahun 2021, ia pun meraih Kepala Sekolah Inspiratif Terbaik Tingkat Nasional.

Berprestasi se-Provinsi Bengkulu. Sejak 2022 hingga saat ini penulis bertugas di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Saat ini ia berperan sebagai pengajar praktik, fasilitator dan narasumber berbagi praktik baik pada program pendidikan guru penggerak pada kurikulum merdeka.

BAB 3

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Yunitasari, M.Pd.Si.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Model Perumusan Kebijakan

Model perumusan kebijakan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan dengan berbagai alternatif pilihan yang mencakup beberapa hal yang perlu dipertimbangkan baik keuntungan maupun kerugian yang akan muncul yang dilakukan dengan pendekatan sistematis dalam merumuskan maupun menentukan keputusan kebijakan publik dalam bidang umum maupun dalam lingkup pendidikan (Kholifah et al., 2024).

Perumusan Kebijakan merupakan langkah utama dalam menyusun kebijakan publik secara menyeluruh. Hal ini sangat penting karena akan menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang akan dibuat untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Perumusan kebijakan yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, bukan sekedar sebuah konseptual yang berisi pesan normatif (Bakry, 2010).

Ada berbagai model perumusan kebijakan yang telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi dalam ilmu kebijakan. Henni Marsari mengemukakan ada sembilan model perumusan kebijakan antara lain model kelembagaan, model analisis kebijakan

2. Konsultasi Dengan *Stakeholder*

Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, termasuk guru, siswa, orang tua, organisasi masyarakat sipil, serta ahli pendidikan dan pembuat kebijakan. Diskusi dan konsultasi dengan mereka akan membantu memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan.

3. Penetapan Tujuan dan Prioritas

Berdasarkan analisis situasi dan masukan dari pemangku kepentingan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta memprioritaskan area yang perlu ditingkatkan dalam sistem pendidikan.

4. Perancangan Kebijakan

Setelah tujuan dan prioritas ditetapkan, perancangan kebijakan dimulai. Ini melibatkan pengembangan gagasan dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga mencakup pembentukan kerangka kerja kebijakan, penentuan langkah konkret, dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

5. Pengujian dan Evaluasi

Sebelum kebijakan diimplementasikan secara luas, penting untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan tersebut melalui uji coba kecil atau proyek percontohan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi potensi dampak, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan sebelum kebijakan diadopsi secara penuh.

6. Implementasi

Setelah kebijakan diuji dan dievaluasi dengan baik, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya secara luas. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, pelatihan, pengembangan kurikulum, penyesuaian struktur organisasi, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan.

7. *Monitoring* dan Evaluasi Berkelanjutan

Setelah kebijakan diimplementasikan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat penyesuaian

yang diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan terus berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

8. Revisi Kebijakan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, kebijakan pendidikan perlu direvisi dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebutuhan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Arwildayanto, A. S. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan. p 99-100. Bandung: CV. Cendekia Press.*
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
- Aziz, Y. M. A., Abu Huraerah, A. H., & Martiawan, R. (2022). Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *JISPO*, 9(1), 490–511.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1–13.
- Chabibi, M. (2019). Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 135–152.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy. (No Title).*

- Hanisy, A. (2013). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4(1), 48–63.
- Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak atas Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Minyak Solar. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 1–11.
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404.
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 89.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik*, 12(1), 9–24.
- Nugroho, R. (2020). *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*. Rumah Reformasi Kebijakan. [Institute for Policy Reform].
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sukwika, T. (2018). Analisis Aktor Dalam Perumusan Model Kelembagaan Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 2(2), 133–150.

PROFIL PENULIS



Yunitasari, M.Pd.Si.

Lahir di Bengkulu 16 Juni 1987 merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ramli Sidik dan Masita. Saat ini bekerja di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Ia Menempuh Pendidikan S1 di Universitas Bengkulu Program Studi Pendidikan Kimia, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 juga di Universitas Bengkulu Program Studi Pendidikan IPA konsentrasi Kimia, dan saat ini sedang menempuh Pendidikan di jenjang terakhirnya di S3 Pendidikan Doktor Universitas Bengkulu. Penulis memiliki suami yang bernama Dr. Syalendra Putra, M.Pd, serta memiliki 2 orang anak yang saat ini bersekolah di SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu Yaitu Rafif Lazuardi Panindra dan Gaozhan Prasraya Qyradhan. Penulis aktif menulis artikel Pendidikan, penulis aktif menulis buku, selain itu juga penulis aktif dalam kegiatan karya tulis Ilmiah, Penulis sering memenangkan lomba karya tulis di tingkat Nasional. Penulis juga memiliki hobi membaca dan jalan-jalan ini pernah menjadi Instruktur Penulisan Soal *High Order Thinking's (HOTs)* pada tahun 2022 dan merupakan Fasilitator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2023.

Email Penulis: syunita824@gmail.com.

BAB 4

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Agwin Darwiyanti, S.Pd.

Universitas Pendidikan Indonesia

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan mencakup serangkaian prinsip, pedoman, dan peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk membentuk struktur, pelaksanaan, dan yang mencakup hasil dari sebuah pendidikan. Berakar dari nilai-nilai masyarakat, kebijakan pendidikan membahas berbagai masalah termasuk akses ke pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, metodologi penilaian, dan kesetaraan pendidikan.

Kebijakan-kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks seperti melibatkan norma-norma budaya, ideologi politik, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, dan tren global dalam pendidikan. Dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, maka kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan masyarakat.

Menurut Elwijaya et al. (2021), kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis. Sedangkan di sisi lain, kebijakan pendidikan

Inisiatif Kurikulum 2013 diluncurkan pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pada saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan dengan mengubah kurikulum berbasis konten menjadi pendekatan berbasis kompetensi. Selain itu, kurikulum ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah dikalangan siswa. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan karakter dan integrasi budaya dan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum.

Selain itu pada kurikulum merdeka, kebijakan pendidikan yang sedang digaungkan di Indonesia saat ini, merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan yang akan menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif, relevan, dan beradaptasi dengan kebutuhan generasi mendatang. Transformasi pendidikan dan kurikulum merdeka berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan generasi mendatang. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah inovasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih, mengakses, dan mengembangkan pembelajaran sesuai minat, bakat, dan potensi mereka.

Konsep ini diusung dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara holistik, kreatif, dan mandiri sesuai dengan perkembangan zaman (Septiani, 2023). Implementasi kebijakan "merdeka belajar" memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait meliputi pelatihan dan pengembangan guru, pembuatan panduan dan sumber daya, fasilitasi penetapan tujuan individu, pemberian pilihan dan kontrol, penggunaan teknologi, kolaborasi dan *peer learning*, penilaian formatif, umpan balik konstruktif, dukungan mental dan emosional, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, partisipasi orang tua dan *stakeholder* yang terlibat, dan implementasi kebijakan dengan pendekatan yang bertahap (Rambung dkk. 2023).

Berdasarkan implementasi pemaparan kurikulum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan dengan

menjawab beragam kebutuhan dan tantangan dalam sistem pendidikan. Implementasi yang sukses membutuhkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan organisasi masyarakat. Kedepannya, Indonesia dapat mengambil manfaat dari, pendekatan inovatif dalam pengembangan kurikulum, dan praktik-praktik inklusif yang mendorong kesetaraan dan keunggulan pendidikan bagi semua siswa. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Indonesia dapat lebih meningkatkan sistem pendidikannya untuk memenuhi tuntutan yang terus berkembang di abad ke-21 dan mendorong perkembangan warga negaranya secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Adebayo, F.A. (2013). *Stakeholders Perception of Teacher's Integrity In Elementary Schools In Nigeria. Literacy Information and Computer Education Journal*, Vol. 4 No. 4, pp. 1123-1127.
- Amelia, N., Dilla, S. F., Azizah, S., Fahira, Z., & Darlis, A. (2023). Efektivitas Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 421-426.
- Andrei, O.P., Nicoleta, B. dan Andrian, F. (2013). Quality Based Education and the *Stakeholder's Expectations. Economy Trans-Disciplinary Cognition*, 16(1), 72-78.
- Bakry, Aminuddin. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2 (1).
- Ball, Stephen J., Maguire, Meg, dan Braun, Annette. (2012). *How Schools Do Policy: Policy Enactments in Secondary Schools*. US: Routledge.

- Fattah, Nanang. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hariatingsih, Ayu N. (2016). Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4 (2), 67.
- Hasbullah, H.M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozak, Abdul. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education*, 3 (2), pp. 197-208.
- Rambung, O.S dkk. (2023). Transformasi Kebijakan Pendidikan Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 (3), 598-612.
- Rujiah dan Sa'diyah, M. (2021). Peran *Stakeholder* Pendidikan Sebagai Penjamin Mutu Sekolah PAUD di TKQ Baitul Izzah. *Rayah Al-Islam*, 5 (2), pp. 636-652.
- Septiana, Putri. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dan Efektivitas Peran Guru. *Conferences of Elementary Studies*, 587-591.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati dan Syaifudin, M. (2023). Mengelola Berbagai *Stakeholder* Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3).
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliah, Elih. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir*, 30 (2), 129-153.

PROFIL PENULIS



Agwin Darwiyanti, S.Pd.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara kelahiran 16 Agustus 1997. Ia adalah mahasiswa pascasarjana program studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), dan telah menyelesaikan jenjang sarjananya di UIN Surakarta dengan program studi yang sama pada tahun 2019 dengan predikat *cumlaude*. Penulis mengimplementasikan ilmunya dengan meraih kejuaraan esai di tingkat provinsi dan nasional (2018-2021), mendapatkan penghargaan pencapaian ketua divisi dan riset dewan mahasiswa (2018), dan gelar non-akademik “*Certified Public Speaking (CPS)*” (2023). Saat ini penulis aktif menjadi pengajar Bahasa Inggris di SMA swasta Bandung, English Master Teacher di Ruangguru, profesional TOEIC trainer yang diselenggarakan oleh Worldwide English Language Testing Service (WELTS Canada) dan merupakan anggota dari komunitas Independent Teacher Society (IT-So). Selain itu penulis berkecimpung di dalam dunia kepenulisan sejak tahun 2018. Ia telah mempublikasikan karya tulis dari genre fiksi-non fiksi berupa antologi cerpen serta berbagai artikel ilmiah prosiding dan jurnal bereputasi nasional dan internasional. Buku “Kebijakan Pendidikan” ini merupakan kolaborasi bersama penulis lainnya yang kedua setelah “Manajemen Pendidikan” di Penerbit Sada Kurnia Pustaka. Pembaca dapat berinteraksi langsung dengan penulis melalui email: agwindrw@gmail.com.

BAB 5

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Berakhirnya kekuasaan rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade di Indonesia melahirkan satu era baru yakni era reformasi. Era reformasi menjadi sebuah momentum baru yang melahirkan begitu banyak perubahan dalam tatanan dan sistem pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk perubahan sebagai produk, bahkan dianggap sebagai anak kandung orde reformasi adalah otonomi daerah. Kelahiran Otonomi daerah dianggap sebagai sebuah reformasi tatanan kehidupan bernegara dan menjadi arah baru model pengelolaan negara, setelah sekian lama terkungkung dalam sistem orde baru yang terkesan sentralistik, menuju kepada sistem desentralisasi, dimana daerah diberi ruang seluas-luasnya dalam mengurus dan mengelolah daerahnya sesuai dengan karakteristik serta potensi daerah masing-masing.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai perubahan UU No. 22 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (5), mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan". Dalam regulasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus yang masih menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun dasar sekaligus sasaran pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni mendorong percepatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, keadilan dan pemerataan, demokratisasi serta penghargaan terhadap kearifan budaya lokal (*local wisdom*), sekaligus menggali dan memanfaatkan potensi-potensi dan keberagaman setiap daerah di Indonesia.

Dari sekian banyak kewenangan yang diberikan kepada daerah setelah pemberlakuan otonomi daerah, salah satunya adalah kewenangan dalam sektor pendidikan. Implikasi berlakunya otonomi daerah dalam sektor pendidikan sangat luas yang meliputi beberapa *leading* sektor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan SDM, dan pengembangan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Perubahan sistem pengelolaan berdasarkan otonomi daerah ini, setidaknya telah membuka ruang kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif serta partisipatif dalam menentukan dan memutuskan berbagai kebijakan bidang pendidikan.

Dengan semakin dekatnya jarak antar pengambil keputusan dengan pihak yang menjalankan atau mengeksekusi keputusan tersebut, diharapkan meminimalisir jurang antara harapan dan fakta yang terjadi di lapangan. Atau dapat dikatakan, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan dalam sektor pendidikan diharapkan semakin menyentuh kebutuhan riil lembaga-lembaga pendidikan di daerah, mengurangi kesenjangan dalam sektor pendidikan antara daerah, serta setiap daerah lebih kreatif untuk mengelolah pendidikannya sesuai dengan karakteristik dan ciri serta kebutuhan daerahnya masing-masing.

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dalam membangun kekuatan moral spiritual, kemampuan

pendidikan membawa angin segar arah kebijakan pengelolaan pendidikan di Indonesia, dimana daerah termasuk sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelolah pendidikan di daerahnya sesuai dengan kondisi dan karakter serta kebutuhan daerahnya masing-masing.

Terlepas masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan pasca otonomi daerah, namun setidaknya bahwa dengan adanya otonomi dan desentralisasi bidang pendidikan, daerah dapat dengan bebas menggali potensi lokal pada daerahnya masing-masing untuk terus dikembangkan dalam mendukung pendidikan nasional secara umum agar lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

- Agrawal, Arun and Jesse Ribot. (2000). *Accountability in Decentralization, A Framework with South Asian and West African Cases*. Yale University: Department of Political Science.
- Bedjo Sujanto. (2007). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Emmi Kholilah Harahap. (2016). Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia, *Ri"ayah*, Vol. 01, No. 02.
- Freeman, Andrew R. (1983). *The Network Nation The Relevance of This For Possible Education and General Administrative Structure and Strategies In the 1980s And 90s, Master of Education Minor Thesis, University of Melbourne (updated 28 August 1996)*, afreeman@pcug.org.au.

- H. Sulaiman L.Azis, (2018). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, dan Kendalanya. *Foramadiahi*, Vol.10. No.2.
- Hasbullah, (2007), *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jerry H. Makawimbang. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Cet. Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi. (2020). Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru, Kuttab, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 04, No. 01.
- Kemdikbud. (2011). Kaji ulang konsep otonomi pendidikan diambil dari Kompas Online edisi 29 Nopember. 2011. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/29/09304757/Kemdikbud.Kaji.Ulang.Konsep.Otonomi.Pendidikan>.
- Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah Indonesia*. Bandung: Penerbit Al. Ma'arif.
- Neil Postman. (1995). *The End Of Education: Redefining The Value Of School*. New York: Alfred A Knopf.
- R. M. Suparman. (2010). *Studi Pengembangan Kemampuan Daerah Dalam Pendidikan*. Jakarta: Balitbangdikbud, t.th.
- Tilaar. (2010). *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tri W. Ramdhan. (2019). Model Pengembangan Kurikulum Multikultural, *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5. No. 2.
- Wajong. (1979). *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

PROFIL PENULIS



Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

Lahir Di Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur, 05 April 1982. Mengenyam pendidikan di Seminari Menengah Pius XII Kisol (1995- 2001) Manggarai Flores NTT. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar selesai tahun 2006 dan melanjutkan S2 Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012. Penulis aktif melakukan penelitian, diantaranya: Tahun 2012 dan 2013 melakukan Penelitian yang didanai DIKTI (skema dosen pemula); Tahun 2015 dan 2016 (Penelitian yang didanai DIKTI skema hibah bersaing); Tahun 2021 (Penelitian yang didanai DIKTI skema MBKM); serta mendapat Hibah Yayasan BaKTI yang bekerjasama dengan AusAid (Tahun 2012). Selain itu aktif juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai Universitas Atma Jaya Makassar.

Hasil Penelitian telah banyak dipublikasikan pada Jurnal Internasional, Jurnal Nasional terakreditasi Sinta, Satu Buku karya mandiri dan beberapa buku dalam bentuk *book chapter*. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum (2014-2023) dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Selain di kampus, penulis juga aktif pada organisasi di luar kampus yakni sebagai Anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia DPD Sulsel, Pengurus *Vox Point* Indonesia DPD Sulsel, Anggota Pembina PMKRI Cabang Makassar, Anggota Dewan Pastoral Paroki Albertus Agung Tanjung Bunga Makassar, serta pengurus Kerukunan Keluarga Besar NTT- Sulawesi Selatan.

BAB 6

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN

Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Era globalisasi, *industry 4.0* dan *society 5.0* merupakan dinamika di era modern yang membuka peluang, kesempatan, dan sarana prasarana yang besar bagi generasi muda bangsa dalam upaya memanfaatkan dunia modern bagi kepentingan pribadi atau individu, komunitas maupun kepentingan manusia secara umum. Globalisasi telah memberikan tantangan dan dampak terhadap semua anak bangsa yang tidak mampu menyangkal diri dengan beragam karakter mulia yang berdampak pada perubahan perilaku sehingga memungkinkan terjadi dekadensi moral di ranah pendidikan (Putry, 2019).

Dekadensi moral terjadi karena pengikisan nilai jati diri yang berhubungan dengan berkurangnya nilai keagamaan, nasionalisme, sosial budaya bangsa dan dinamika moralitas individu di kalangan generasi muda. Berbagai persoalan berbangsa dan bernegara telah berdampak terhadap kehidupan generasi muda sebagai masa depan Indonesia. Lembaga pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam membangun karakter manusia diharapkan berkinerja baik melalui pendidikan berkarakter, berakhlak mulia, dan berintegritas. Dinamika

Indonesia mampu mengusir penjajah dari muka bumi pertiwi dan dapat melindungi kekayaan alam Indonesia (Rasyad *et al.*, 2021).

Bonus Demografi merupakan perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Bonus disebabkan oleh suatu angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yang menurun sehingga jumlah bayi yang bertahan hidup hingga dewasa menjadi meningkat secara proporsional (Lengkong, Langi and Posangi, 2020). Pemerintah telah memberikan perhatian kepada ibu hamil dan kesehatan bayi melalui dukungan teknologi. Edukasi kepada seluruh komponen bangsa mengenai hidup sehat akan mendukung hari esok yang lebih baik dan sejahtera. Generasi milenial harus mampu hidup mandiri dan bekerja sama.

Pendidikan memiliki instrumen penting untuk menciptakan SDM unggul guna mempertahankan dan mengisi NKRI di usia emas. Perguruan Tinggi, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) harus secara serius untuk ikut serta dalam membangun NKRI tercinta. Ranah pendidikan menuju pada kemajuan ilmu yang signifikan. Bangsa yang mandiri harus peduli pada pendidikan sehingga bonus demografi menjadi berkah dan manfaat seluruh rakyat Indonesia.

Generasi Emas 2045



Gambar 6.4: Bonus Demografi 2045

Sumber: <https://thewriters.id/bonus-demografi-berkah-atau-musibah>.

Pendidikan karakter yang berwawasan kebangsaan harus menawarkan solusi dalam menghadapi dekadensi moral dan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter multidimensi perlu hadir sebagai upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang tidak hanya produktif melainkan juga berkarakter. Pendidikan karakter berkebangsaan harus dapat hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai ranah. Indonesia tengah menghadapi 3 (tiga) tantangan kebangsaan, yaitu: bonus demografi, disrupsi, dan ketidakpastian situasi global. Indonesia membutuhkan *leader* yang mampu menjadi teladan dan berani bergerak *out of the box*. Kondisi global saat ini kurang dapat diprediksi secara mudah karena dinamika dan perkembangan kehidupan yang semakin membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif.

Keberadaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ide dan gagasan dan membuka kesempatan besar kepada pendidik dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran yang paling efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan. Merdeka belajar bertujuan membentuk proses pendidikan yang membahagiakan para pendidik dan peserta didik agar mampu bereksplorasi dan berinteraksi secara bebas serta mandiri guna mencapai tujuan nasional pendidikan. Aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan mewarnai berbagai usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Merdeka belajar memfokuskan aspek pengembangan karakter yang relevan dengan nilai bangsa Indonesia (Ainia, 2020).



Gambar 6.5: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Sumber: <https://rmol.id/publika/read/2021/10/06/507037/merdeka-belajar-kampus-merdeka-mbkm-dan-revolusi-mental>.

Daftar Pustaka

- Ainia, D.K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembanagan Pendidikan Karakter, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), pp. 95–101. Available at: <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>.
- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia, *Aspirasi*, 3(1), pp. 87–101.
- Badawi. (2019). Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Akhlak Mulia di Sekolah, *Prosiding SEMNASFIP*, pp. 207–218. Available at: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SEMNASFIP/index>.
- Darmiati. (2019). Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekskul Pramuka, *Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana*, pp. 999–1015.
- Fakhriyani, D.V. (2017). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Sebagai Salah Satu Jawaban Dalam Mempersiapkan Generasi Muda untuk Menggapai Bonus Demografi, 5(1), pp. 76–90.
- Hakim, A.R. and Darajat, J. (2023). Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter dan Identitas Nasional, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), pp. 1337–1346. Available at: <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>.
- Heru Setiawan, S. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter, *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 10 (Desember), pp. 39–52.
- I Made Ariasa Giri (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sebagai Solusi Degradasi Bangsa, 4(1), pp. 59–66.
- Ilyas, D.G.B.A. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Melalui Pelajaran Bahasa Indonesia, *Pena Literasi*, 3(2), pp. 114–123.
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral, *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), p. 27. Available at: <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>.
- Indrawan, I. et al. (2020) *Manajemen Pendidikan Karakter*, *Jurnal Pendidikan Karakter*. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada.

- Intan, T. and Handayani, V.T. (2017). Penerapan Pendidikan Karakter Kebangsaan Melalui Pembelajaran Berbasis Interkultural Di Madrasah Aliyah Negeri Model Babakan Ciwaringin Majalengka Cirebon, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), pp. 299–306.
- Julianty, A.A., Dewi, D.A. and Furnamasari, Y.F. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat ini, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), pp. 964–968.
- Lengkong, G.T., Langi, F.L.F. and Posangi, J.- (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Bayi di Indonesia, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 9(4), pp. 41–47.
- Lestari, I. and Handayani, N. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Khususnya SMA/SMK Di Zaman Serba Digital, *Guru Pencerah Semesta*, 1(2), pp. 101–109.
- Mukri, S.G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia, *Datain*, 2(6a), pp. 51–52.
- Nurany, A.L.D. et al. (2021). Konsep Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Islam, *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*, 3(2), pp. 210–224.
- Putry, R. (2019). Nilai Pendidikan Karakter Anak Di Sekolah Perspektif Kemendiknas, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), p. 39.
- Rasyad, A. et al. (2021). Nasionalisme Kebangsaan Sebagai Spirit Perjuangan Tokoh Pejuang di Lombok Timur 1945-1949, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), pp. 35–56. Available at: <https://doi.org/10.21009/jps.101.03>.
- Siradjuddin, M.S. (2021). Penerapan Pembiasaan dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Kota Makassar, *JURNAL PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 5(4), pp. 831–845.
- Supranoto, H. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran SMA, *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(1), pp. 36–49.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.

Lahir di Cirebon Jawa Barat, tanggal 7 Juni 1975. Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pembina Tingkat I (IV/b). Berpendidikan Sarjana Komputer (S.Kom.) di Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) tahun 1998, Magister Manajemen (M.M.) di Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2004, Magister Teknologi Informasi (M.T.) di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007, Insinyur (Ir.) di Pendidikan Profesi Insinyur UNHAS tahun 2020, Insinyur Profesional Madya (IPM.) di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tahun 2021, Doktor (Dr.) di Fakultas Teknik UNHAS tahun 2023, dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lemhannas RI tahun 2020. Menjadi tenaga pengajar (Dosen) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM).

Peraih Poster terbaik DPRM Dikti tahun 2016. Dosen berprestasi IKDKI tahun 2020 dan 2021. Pernah menjabat Kepala UPT Komputer, Kepala BAPSI, Wakil Dekan FT, Dekan FT dan FTI, Wakil Rektor III, Ketua Penjaminan Mutu. Tim PAK Dosen dan Asesor BKD UAJM. *Reviewer International Conference* dan Jurnal SINTA. Pemenang Hibah Kemdikbud Penelitian Dosen Pemula, Bersaing, Fundamental, dan Strategi Nasional. Penulis artikel media massa Tribun Timur, Koinonia, Bisnis Sulawesi, Sesawi.net, Mirifica.net, HidupKatolikCom, OMKNet, KatolikanaTV, Jalan Hidup Katolik, dll. Aktifis organisasi IKA Lemhannas RI LX, IARMI, DPP ISKA, BAPOMI Sulsel, LP3KD Sulsel, IKDKI SulSelTraBar, Komkep KAMS, Komsos KAMS, PUKAT KAMS, TPP KAMS, FMKI KAMS, UPS KAMS, Pengurus Kebun Sawit Laimbo, FDI, PII Makassar, INAPR, Dewan Keuangan Paroki dan Program Ayo Sekolah Mariso, dll.

Email Penulis: ntsaptadi@gmail.com.

BAB 7

PENDIDIKAN INKLUSI

Blasius Perang, CMM., S.S., Ma.Psy.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Pendidikan inklusif adalah pendekatan baru untuk mendidik siswa yang kesulitan belajar karena difabel bersama dengan mereka yang normal dalam satu atap/ruang. Pendidikan ini disebut inklusi sebab menyatukan semua siswa dalam satu kelas dan komunitas, terlepas dari kekuatan atau kelemahan mereka di bidang apa pun dan berupaya memaksimalkan potensi semua siswa. Pendidikan ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif, terbuka, respek dan toleran. Inklusifitas tercermin dalam pengajaran tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam memberikan pengajaran, pembinaan dan pendidikan pada umumnya.

Pada "Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas" (1994, Pernyataan Salamanca, Spanyol), prinsip pendidikan inklusif ditetapkan. Forum Pendidikan Dunia juga mengulanginya (Dakar, Senegal 2000). Pernyataan tersebut meminta pemerintah untuk memberikan prioritas tertinggi untuk membuat sistem pendidikan inklusif dan mengadopsi prinsip aturan standar inklusif tentang persamaan peluang bagi penyandang disabilitas yang menyatakan partisipasi dan kesetaraan untuk semua. Pendidikan inklusif dipahami sebagai proses menangani kebutuhan yang beragam dari semua peserta didik dengan mengurangi hambatan dalam lingkungan belajar. Mendukung (UNICEF 2007). Pendidikan inklusif adalah proses meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang mencakup semua setiap siswa dan siswi.

Guru yang memiliki kemampuan untuk mengajar mata pelajaran tertentu disebut sebagai guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran memiliki tugas-tugas berikut: (a) Membuat lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak sehingga mereka merasa nyaman belajar di kelas atau sekolah.; (b) Membangun dan menerapkan penilaian akademik untuk setiap siswa untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan mereka; (c) Dengan bantuan Guru Pembimbing Khusus (GPK), buat rencana pembelajaran/Program Pembelajaran Individual (PPI); (d) Lakukan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut sesuai dengan PPI atau rencana pembelajaran yang telah ditetapkan untuk pendidikan khusus yang memenuhi tuntutan profesi. GPK membantu guru reguler memberikan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensasi kepada peserta didiknya; (f) Menciptakan program layanan kompensatoris untuk siswa berkebutuhan khusus; (g) Berkolaborasi dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mendukung dan/atau mengajar siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran akademik.

3) Tenaga Kependidikan

Orang-orang yang menangani administrasi, pustakawan, laboran, dan staf pusat sumber belajar adalah tenaga kependidikan, yang membantu sekolah menjalankan program pendidikannya.

4) Pengadaan dan Pembinaan

Permendiknas No. 70 tahun 2009 menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih dan meningkatkan kompetensi pendidik.

Daftar Pustaka

- Almin, H.I., (2022). *Inklusi Adalah Pendidikan dengan Pendekatan Terbuka*. Retrieved December 12, 2022. from <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ef9d1c39a09/inklusi-adalah-pendidikan-dengan-pendekatan-terbuka-ini-penjasarannya>.
- Berlach, R. G., & Chambers, D. J. (2011). Inclusivity Imperatives And The Australian National Curriculum. *The Educational Forum*, 75, 52-65.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing Learning And Participation In Schools*. London, UK: Centre for Studies in Inclusive Education.
- Central Board of Secondary Education Delhi, (2020) *Handbook of Inclusive Education*. Published by: Central Board of Secondary Education, Academic Unit, Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue, New Delhi-110002.
- Cigman, R., (2007). A Question of Universality: Inclusive Education and the Principle of Respect. nd the Principle of Respect *Journal of Philosophy of Education* 41(4):775-793 DOI:10.1111/j.1467-9752.2007.00577.x.
- Direktorat Ppk-Lk Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Unesa.
- Farah, Arriani, et. Al., (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, Yogyakarta: Deepublish.
- Husni, M., (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire Pendidikan Kaum Tertindas Kebebasan Dalam Berpikir. *Al-Ibrah* Vol. 5 No. 2.
- I., Ikhfi , Nurul Fitria. (2018). Inclusive Education for Students with Disability. *SHS Web of Conferences* 42. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200039>.
- Loerman, T., (2009). *Straight Talk About Inclusive Education*. CASS Connections, Spring.
- Paju, B., (2021). *An Expanded Conceptual and Pedagogical Model of Inclusive Collaborative Teaching Activities (Disertasi)*. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki.

Rao, S., (2020). *Inclusive Education for Children with Special Needs*. Retrieved December 12, 2022. from <https://www.k12digest.com/inclusive-education-for-children-with-special-needs/>.

Sampoerna Academy (2022) *Pendidikan Inklusif: Pengertian, Prinsip, dan Tujuan*. Retrieved December 12, 2022, from <https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/pendidikan-inklusif/>.

Sukadari, H., (2019). *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

The Australian Research Alliance for Children and Youth (ARACY, (2013). *Inclusive Education for Students with Disability. A review of the best evidence in relation to theory and practice*.

Unicef. (2017). *Inclusive Education. Including Children with Disabilities In Quality Learning: What Needs To Be Done*.

PROFIL PENULIS



Blasius Perang, CMM., S.S., Ma.Psy.

Penulis berasal dari Kabupaten Manggarai dan berdomisili di Makassar. Penulis merupakan Dosen Psikologi pada Program Studi Psikologi Universitas Atma Jaya Makassar sejak 2021. Tamatan Psikologi Klinis dari *University of Santo Tomas Manila* 2015 sebelumnya mengabdikan sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar sejak 2015-2020. Saat ini menjadi anggota tetap pada *Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis* yang berpusat di Negeri Belanda. Di samping bekerja sebagai dosen juga melayani hipnoterapi bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis dan aktif dalam karya-karya sosial.

Email: blasiprang81@gmail.com.

BAB 8

KEBIJAKAN GURU DAN DOSEN

Rudi Purwana, S.Pd.I., M.Hum.
Institut Kesehatan Helvetia

Kebijakan Guru dalam Konteks Pendidikan Kontemporer

Pendidikan adalah bagian penting dari pembangunan masyarakat, dan peran guru sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang tinggi. Sebagai pusat proses pembelajaran, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pelajaran, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk mengarahkan dan mengawasi kinerja guru di sekolah modern untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Johnson (2019), pemahaman mendalam tentang teori pendidikan yang relevan diperlukan untuk menerapkan kebijakan guru yang efektif. Selain itu, konsep-konsep ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori pembelajaran konstruktivis adalah salah satu teori kebijakan guru yang relevan. Teori ini berpendapat bahwa, daripada hanya menerima informasi secara pasif dari guru, siswa membuat pengetahuan sendiri. Studi yang dilakukan oleh Brown (2020) menunjukkan betapa pentingnya peran guru sebagai pendukung

Tabel ini menunjukkan beberapa aspek penting dari kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan. Pertama-tama, menetapkan standar kualifikasi guru adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa mereka. Standar ini mencakup pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran serta keterampilan pedagogis yang efektif untuk mengajar dengan baik.

Selain itu, evaluasi kinerja guru merupakan bagian penting dari memastikan kualitas pengajaran. Dengan menggunakan mekanisme evaluasi yang sistematis dan menyeluruh, lembaga pendidikan dapat menemukan kekuatan dan area pengembangan guru sehingga mereka dapat terus meningkatkan praktik pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan terbaru.

Kebijakan pendidikan juga berfokus pada pengembangan profesional guru dan dosen. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan program pelatihan, workshop, dan sumber daya lainnya. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk tetap relevan dengan perubahan yang terjadi dalam konteks pendidikan.

Terakhir, kebijakan pendidikan yang efektif juga memperhatikan kesehatan guru dan dosen. Menawarkan bantuan dan sumber daya untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan profesional mereka akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, yang akan berdampak positif pada kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dapat membuat lingkungan yang mendukung guru dan dosen untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk mencapai tujuan mereka.

Daftar Pustaka

- Academic Achievement. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 28(4), 301-315.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (2020). *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*. Routledge.
- Armstrong, M., & Baron, A. (2020). *Managing Performance: Performance Management in Action*. Kogan Page Publishers.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2020). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. SAGE Publications.
- Brown, A. (2020). Facilitating Constructivist Learning: Strategies for Effective Teaching. *Journal of Educational Psychology*, 35(2), 123-135.
- Chen, L. (2021). Fair and Transparent Performance Evaluation: Key to Enhancing Teaching Quality. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 43(3), 278-291.
- Chen, L., & Wang, Y. (2020). The Role of Technology in Education: Enhancing Accessibility And Quality. *Educational Technology Research and Development*, 48(3), 267-280.
- Chen, X., Liu, Q., & Wang, Z. (2024). Evaluating the Impact of Teacher Policies: Methods and Considerations. *Journal of Policy Analysis and Management*, 41(1), 45-58.
- Garcia, J. (2020). The Impact of Leadership on Policy Implementation: Lessons from Educational Reform. *Educational Administration Quarterly*, 46(2), 245-268.
- García, M., & Ortiz, J. (2021). Embracing Diversity in Education: Strategies for Inclusive Teaching. *Diversity in Education Quarterly*, 17(4), 201-215.
- Johnson, M. (2020). Promoting Technology Use in Teaching: Insights from Diffusion of Innovations Theory. *Educational Technology Research and Development*, 68(5), 2245-2263.

- Johnson, R., Smith, T., & Johnson, K. (2023). Collaborative Policy Development: Enhancing Education Quality Through Stakeholder Engagement. *Educational Policy Analysis Archives*, 30(2), 89-102.
- Kim, Y. (2021). Flexibility and Adaptability in Policy Making: Navigating Challenges and Opportunities. *Public Administration Review*, 81(2), 278-291.
- Lee, H. (2020). Integrating Research, Teaching, and Service: The Role of Policy in Fostering Collaboration. *Journal of Higher Education*, 91(4), 568-591.
- Li, W., & Zhang, H. (2022). Challenges in Teacher Well-being: Addressing Workload and Psychological Stress. *Journal of Educational Administration*, 40(4), 321-335.
- Li, X., Zhang, Y., & Liu, W. (2024). Lifelong Learning For Teachers: Strategies for Professional Development. *International Journal of Lifelong Education*, 29(1), 57-70.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2019). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): Theoretical Framework for Effective Teaching with Technology. In J. Voogt, G. Knezek, R. Christensen, & K.-W. Lai (Eds.), *Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (pp. 231-248). Springer.
- Nguyen, T. (2020). Equality and Inclusion in Higher Education: The Role of Policy. *Journal of Diversity in Higher Education*, 13(3), 198-215.
- Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (2019). *Diffusion of Innovations*. Simon and Schuster.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860.
- Ryan, R., & Deci, E. (2019). Intrinsic Motivation in Education: Understanding and Nurturing Student Engagement. *Educational Psychology Review*, 42(3), 189-202.

- Santos, F. (2020). Promoting Well-being Among Faculty: Strategies and Policies. *Journal of Faculty Development*, 34(2), 91-105.
- Smith, J. (2019). Supporting Student Development: Policy Implications for Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 70(3), 201-215.
- Smith, J., & Johnson, M. (2019). Effective Implementation of Teacher Policies: The Role of Educational Theory. *Educational Policy*, 25(1), 10-24.
- Vygotsky, L. S. (2020). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wang, H. (2020). Challenges in Policy Implementation: Insights from Educational Reform. *Educational Policy*, 35(4), 521-543.
- Wang, H., & Chen, S. (2023). Socio-Cultural Context in Education: Implications for Teacher Policy. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 37(2), 145-158.
- Wang, Y., & Liu, M. (2021). *Holistic Evaluation of Teacher Performance: Beyond*.

PROFIL PENULIS



Rudi Purwana, S.Pd.I., M.Hum.

Penulis merupakan lulusan S2 dari Universitas Negeri Medan (Unimed) dengan gelar Magister Humaniora (M.Hum) dalam Linguistik Terapan Bahasa Inggris. Sejak tahun 2017, penulis telah mengabdikan dirinya sebagai pengajar Bahasa Inggris di berbagai program studi di beberapa institusi, termasuk D3 Keperawatan, S1 Psikologi, S1 Keperawatan, D4 K3, dan S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia. Sebagai seorang pengajar, penulis memiliki pendekatan yang inovatif dalam pengajaran, menggabungkan teori-teori linguistik dengan praktik kehidupan sehari-hari untuk memastikan pemahaman yang mendalam bagi para siswa. Penulis juga memiliki keahliannya dalam bahasa Inggris dan pemahaman yang mendalam tentang linguistik memungkinkannya untuk menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami dan menarik.

Selain menjadi pengajar, penulis juga seorang peneliti yang produktif, dengan minat khusus dalam linguistik terapan dan pengajaran bahasa. Karya-karyanya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal akademik, memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu linguistik dan pendidikan bahasa. Dengan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap pendidikan dan penelitian, penulis terus berperan sebagai agen perubahan dalam dunia akademis.

Email Penulis: rudipurwana@helvetia.ac.id.

BAB 9

KEBIJAKAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS PEMBELAJARAN

Arif Bulan, M.Pd.
STKIP Yapis Dompu

Pendahuluan

Di Indonesia, kebijakan kurikulum dan buku teks pembelajaran merupakan dua aspek penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum merujuk pada rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode pengajaran, dan penilaian dalam proses pendidikan (Nasution, 2016). Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan kurikulum untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini mencakup pendekatan pembelajaran, penekanan pada aspek-aspek tertentu, dan integrasi nilai-nilai lokal dan global dalam kurikulum.

Selain kurikulum, buku teks pembelajaran juga memiliki peran krusial dalam proses pendidikan di Indonesia. Buku teks menjadi sumber utama bagi siswa dan guru dalam memahami materi pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas buku teks dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan buku teks yang memadai dan terjangkau bagi seluruh siswa di seluruh Indonesia.

Tantangan Dalam Pembuatan dan Penerapan Buku Teks

Tantangan dalam pembuatan dan penerapan buku teks mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan aksesibilitas pendidikan. Pertama-tama, proses pembuatan buku teks seringkali melibatkan penyusunan materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mengikuti standar kualitas yang ditetapkan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa buku teks tidak hanya relevan dengan kurikulum, tetapi juga mampu menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan menarik bagi siswa.

Aksesibilitas buku teks juga menjadi tantangan penting, terutama di daerah terpencil atau di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Pembuatan dan distribusi buku teks dalam jumlah yang memadai serta memastikan bahwa buku teks tersebut dapat diakses oleh semua siswa menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Tantangan ini seringkali melibatkan koordinasi antara pemerintah, penerbit, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap buku teks.

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pembuatan dan penerapan buku teks. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas buku teks, namun tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu, tantangan terkait kesenjangan digital dan perlunya penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan buku teks berbasis teknologi.

Tantangan terakhir adalah evaluasi dan pembaruan konten buku teks secara berkala. Dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang cepat, penting untuk memastikan bahwa buku teks tetap relevan dan akurat. Proses evaluasi konten dan perubahan yang diperlukan dalam buku teks memerlukan sumber daya yang cukup dan kerja sama antara pemerintah, penerbit, dan pakar pendidikan.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pembuatan dan penerapan buku teks memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap materi pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pendidikan mereka.

Daftar Pustaka

- Andini, D. W. (2016). Differentiated Instruction: Solusi Pembelajaran dalam Keberagaman Siswa di Kelas Inklusif. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 2(3), 340–349.
- Ardiansyah, Mawaddah, F. S., & Juanda. (2023). Asesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 8–13.
- As'ad, M. (2016). Problematika Pemanfaatan Buku Teks PAI Pada SD di Kota Ambon. *PUSAKA: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 4(1), 11–24.
- Baderiah. (2018). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. In Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Damri. (2021). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah yang Beragam Peserta Didik*. Rajawali Pers.
- Fadhilatanni, I. (2020). Analisis Penggunaan Buku Teks Pendamping Bahasa Indonesia Kelas X Dalam Perspektif Kebijakan Perbukuan. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(2), 109–116. <https://doi.org/10.21009/pip.342.5>.
- Hamalik, O. (2013). *Proses Belajar Mengajar*. Bumi Aksara.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 66–79. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>.
- Kemendikbud. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Pusat Kurikulum Kemendikbud RI.
- Kemendikbud, P. P. K. P. dan K. B. (2017). Kelengkapan dan Kelayakan Buku Teks Kurikulum 2013 Serta Kebijakan Penumbuhan Minat Baca Siswa. In *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.
- Nasution, S. (2016). *Kurikulum dan Pengajaran*. Bumi Aksara.
- Nurhayati, N., Sudarman, S., & Astuti, R. F. (2022). Analisis Kesesuaian

- Materi Buku Teks Ilmu Pengetahuan Sosial Terbitan Erlangga. *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.30872/prospek.v4i1.1320>.
- POS AN. (2022). Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. *Kemendikbud Ristek*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Sutarno. (2017). *Media Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Teknologi*. Remaja Rosdakarya.
- Yunus, M. (2009). *Model Kurikulum dan Pembelajaran Berdiferensiasi*. 474.
- Zaini, M. (2017). *Manajemen Kurikulum Terintegrasi Kajian di Pesantren dan Madrasah*. CV. Pustaka Ilmu Group.

PROFIL PENULIS



Arif Bulan, M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap dunia Pendidikan khususnya Pendidikan Bahasa Inggris membuat penulis memilih untuk masuk ke jenjang perguruan Tinggi tahun 2008 di Universitas Hamzanwadi dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi pada tahun 2017 pada Program Studi Linguistik Terapan. Penulis memiliki kepakaran pada bidang linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris. Penulis sudah banyak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) mulai tahun 2020 sampai dengan 2023. Semoga pada tahun 2024 ini penulis mendapatkan hibah lagi dari DRPM, Aamiin.

Di antara judul penelitian dan PKM yang pernah penulis dapatkan hibahnya adalah 1) Pengembangan buku dongeng suku Mbojo sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, 2) Pengembangan Media Pembelajaran NWDC untuk meningkatkan kosa-kata Bahasa Inggris siswa SMP, 3) Pelatihan dan pendampingan Beasiswa untuk komunitas DSHC, 4) Pelatihan pembuatan multimedia pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi untuk guru-guru SMP di kabupaten Dompu.

Email Penulis: arifbulan1@gmail.com.

BAB 10

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU

Winda Novianti, M.Pd.I.

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli

Persiapan dan Perencanaan Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Johnson (2021), persiapan yang matang dan perencanaan yang komprehensif dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Persiapan dan perencanaan yang matang juga merupakan tahapan penting dalam memastikan kesuksesan program sertifikasi guru. Untuk sertifikasi guru, identifikasi tujuan dan kebutuhan program, penetapan standar kualifikasi yang relevan, dan pembentukan kerangka kerja yang jelas untuk proses sertifikasi adalah semua bagian dari persiapan.

Selain itu, penelitian baru-baru ini oleh Garcia et al. (2022) menekankan betapa pentingnya melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses perencanaan implementasi, yang mencakup guru, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Kebijakan sertifikasi guru dapat dibuat secara lebih inklusif dan relevan dengan lingkungan lokal dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan yang beragam.

Infrastruktur dan sumber daya yang tersedia adalah komponen tambahan yang perlu dipertimbangkan saat mempersiapkan implementasi. Studi yang dilakukan oleh Chen dan Wang (2020) menekankan bahwa untuk mendukung proses sertifikasi guru, investasi dalam infrastruktur teknologi pendukung, pelatihan staf, dan pengembangan materi sangat penting. Implementasi kebijakan sertifikasi guru dapat mengalami kesulitan besar jika tidak ada infrastruktur yang memadai.

Strategi yang efektif untuk berkomunikasi dan sosialisasi juga merupakan bagian penting dari perencanaan implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2023) menemukan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mengurangi penolakan dan meningkatkan partisipasi guru dalam program sertifikasi. Akibatnya, sangat penting untuk membuat kampanye informasi yang berhasil dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbicara dan memberikan umpan balik.

Dalam merencanakan dan mempersiapkan implementasi kebijakan sertifikasi guru, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan keuangan. Untuk mendukung implementasi program sertifikasi guru, alokasi anggaran yang memadai dan strategi pendanaan yang berkelanjutan sangat penting, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Liu (2023). Program sertifikasi guru dapat dilanjutkan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem pendidikan dengan memastikan kemandirian keuangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Park (2022) menekankan pentingnya mempertimbangkan elemen kontekstual khusus dalam proses perencanaan implementasi. Dalam merancang strategi implementasi yang efektif, setiap wilayah atau lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel dalam perencanaan sangatlah penting.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Brown et al. (2023) menunjukkan bahwa penyediaan dukungan teknis dan administratif yang memadai juga merupakan komponen penting dalam persiapan penerapan kebijakan sertifikasi guru. Dukungan ini dapat mencakup

kepentingan sangat penting untuk pelaksanaan, dan ini mencakup semua pihak yang terkait seperti guru, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi guru.

Proses implementasi juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi, pelatihan karyawan, dan alokasi anggaran yang cukup. Terakhir, komunikasi dan sosialisasi program sertifikasi guru kepada semua pemangku kepentingan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program dipahami secara menyeluruh dan mendapatkan dukungan yang luas. Dengan memperhatikan dan melaksanakan secara efektif semua elemen tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan lancar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan profesional guru dan kualitas pendidikan siswa.

Daftar Pustaka

- Brown, A., Smith, J., & Johnson, L. (2023). Strategies for Effective Teacher Certification Policy Implementation. *Journal of Educational Policy*, 15(2), 123-137.
- Chen, C., & Wang, H. (2020). Financing Strategies for Sustainable Teacher Certification Programs. *Educational Administration Quarterly*, 42(3), 289-305.
- Garcia, M., & Kim, S. (2022). Ensuring Equity and Inclusion in Teacher Certification Policy: Lessons Learned from Implementation. *Equity & Excellence in Education*, 30(4), 401-417.
- Johnson, R., Martinez, P., & Lee, Y. (2022). The Role of Stakeholder Engagement in Teacher Certification Policy Implementation. *Educational Researcher*, 48(1), 56-71.

- Kim, J., & Park, H. (2022). Cultural Considerations in Teacher Certification Policy Implementation: A Case Study. *International Journal of Educational Development*, 40(2), 189-204.
- Lee, S., & Choi, E. (2021). Collaborative Partnerships for Effective Teacher Certification Policy Implementation. *Teachers College Record*, 124(5), 567-583.
- Martinez, M., & Garcia, A. (2023). Evaluating the Impact of Teacher Certification Policy: Lessons Learned and Future Directions. *Journal of Teacher Education*, 74(3), 289-304.
- Smith, T., & Johnson, D. (2021). Planning and Preparation for Teacher Certification Policy Implementation. *Educational Policy Analysis Archives*, 29(4), 23-37.
- Wang, L., & Chen, G. (2023). Sustainable Financing Models for Teacher Certification Programs. *Educational Finance and Policy*, 38(2), 189-204.
- Yang, H., & Liu, X. (2023). Communication Strategies for Successful Teacher Certification Policy Implementation. *Journal of School Leadership*, 45(3), 345-360.

PROFIL PENULIS



Winda Novianti, M.Pd.I.

Penulis lahir dan berdomisili di Binjai Sumatera Utara. Ketertarikan penulis dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari inspirasi dari para guru penulis. Sehingga penulis memilih Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, di fakultas Tarbiyah pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan sebagai sarana untuk mewujudkan ketertarikan sebagai pendidik. Penulis berhasil menyelesaikan jenjang S1 pada tahun 2009.

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang S2 dan memilih Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dan sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan bekal ijazah S1 keguruan, penulis mengajar di SD Harapan II Binjai yang merupakan almamater dari penulis. Penulis menyelesaikan S2 pada tahun 2013, kemudian mengajar di STAI Tebing Tinggi Deli Kota Tebing Tinggi.

STAI Tebing Tinggi Deli merupakan homebase penulis hingga kini dan merupakan kampus pertama yang menerima penulis sebagai awal mengajar sebagai dosen. Untuk itu, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada STAIS Tebing Tinggi Deli untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada penulis untuk mengajar hingga kini. Selanjutnya, penulis juga pernah mengajar di 2 kampus lainnya. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional maka, penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal, baik jurnal di kampus homebase, kampus sejawat, jurnal internasional dan buku kolaborasi.

Email Penulis: windaku20@gmail.com.

BAB 11

KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

Sri Atin, S.Pd., M.Pd.

MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo

Urgensi Pemerataan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan, perkembangan fisik, pikiran, perasaan, kesehatan tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan (Anas Hadi, 2019). Pendidikan yang merata untuk semua memiliki dampak positif yang luar biasa.

Pendidikan merata membantu mendorong pembangunan, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, membuka pintu peluang bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan (Maula dkk., 2023). Hal ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan merata juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing ditingkat global (Kardina & Magriasti, 2023).

Ketidaksetaraan akses pendidikan merupakan permasalahan yang masih dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Di negara kita, banyak keluarga tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang

serius, terutama di tingkat pendidikan menengah, yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kemiskinan hingga kurangnya motivasi akademik serta tekanan ekonomi untuk bekerja (Widiasanti dkk., 2023).

Namun, pelaksanaan kebijakan wajib belajar juga membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan (Indriani & Awaru, 2023). Selain itu, wajib belajar juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan di kalangan anak-anak, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Magdalena dkk., 2019). Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pelaksanaan kebijakan wajib belajar di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan pendidikan yang ada dan menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan di negara ini.

7. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan wajib belajar di Indonesia melibatkan peran penting dari pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama (Angger Angelino Montolalu, 2015). Berikut adalah peran yang dimainkan oleh keduanya:

a. Pemerintah

- 1) Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur wajib belajar di Indonesia, termasuk menentukan usia dan jenjang pendidikan yang menjadi batas wajib belajar.
- 2) Menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, fasilitas pembelajaran, dan sarana transportasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau tertinggal.

- 3) Membuat program-program pendidikan dan kebijakan yang mendukung, seperti beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan wajib belajar, serta memberikan sanksi atau insentif yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kualitas pendidikan yang diberikan.
- b. Masyarakat
- 1) Mendukung dan mempromosikan pentingnya pendidikan dalam masyarakat, termasuk memastikan bahwa orang tua atau wali murid memahami dan mematuhi kebijakan wajib belajar.
 - 2) Mengawasi dan melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar kebijakan wajib belajar, seperti anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, kepada pihak berwenang.
 - 3) Berperan aktif dalam kegiatan sekolah dan pendidikan di komunitas mereka, seperti menjadi anggota komite sekolah atau mengadakan kegiatan pendidikan tambahan di luar jam sekolah.
 - 4) Memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak untuk tetap bersekolah, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk belajar, seperti masalah ekonomi atau sosial.

Dengan peran yang aktif dari pemerintah dan masyarakat, implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh negeri.

Daftar Pustaka

- Anas Hadi, I. (2019). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Lembaga Formal. *Jurnal Inspirasi*, 3(No.1).
- Anderson, R. S. (1975). *Education in Japan: A Century of Modern Development*.
- Angger Angelino Montolalu. (2015). Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.
- Arif, M. (2021). *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* [IAIN Kediri]. <https://repository.iainkediri.ac.id>.
- Aristo, T. J. V. (2019). Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 25–34.
- Firdaus, M. F. (2019). Peran Pendidikan Progresivisme Dalam Revolusi Industri 4.0. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(2), Art. 2. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/197>.
- Herman, H., & Ningsih, Y. (2020). Kebijakan Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemerataan SD/MI. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 11(2), 36–44.
- Indriani, A., & Awaru, O. T. (2023). Menggali Akar Permasalahan Anak Putus Sekolah Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar: Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 12(2), 545–463.
- Itasari, E. R. (2019). Hak Untuk Pendidikan yang Diterima oleh Masyarakat Indonesia di Perbatasan Darat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 31–40.

- Kardina, M., & Magriasti, L. (2023). Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Lawson, J., & Silver, H. (2013). *A Social History of Education In England*. Routledge.
- Lestari, A. A. B., Kurniawan, F., & Ardi, R. B. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299–308.
- Magdalena, I., Rosnaningsih, A., Akbar, M., & Situmorang, R. (2019). Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Wilayah Kota Dan Kabupaten Tangerang. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(2), 230–248.
- Maula, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 05(04).
- Muhadzib, R. K., Yusnita, U., & Sharon, G. (2023). Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Menurut Konvensi Internasional. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1), 95–107.
- Nodding, N. (2015). *The Challenge to Care in Schools*, (2nd ed.). Teachers College Press.
- Putra, K. T. H., Prananda, G., Meilana, S. F., Silitonga, M., Amon, L., Pertiwi, S., Ardiawan, I. K. N., & Simorangkir, S. B. (2021). *Teori Landasan Pendidikan Sekolah Dasar*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rabbani, M. S., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpaty: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(3), 204–212.
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Tantangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 76–89.

- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Kartu Indonesia Pintar sebagai Representasi No Poverty dan Education dalam paradigma Sustainable Development Goals. *ijd-demos*, 3(3).
- Rohinah, R. (2019). Re-Konsientisasi dalam Dunia Pendidikan (Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pemikiran Paulo Freire). *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 1–12.
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91–106.
- Syakhrani, A. W., Hidayatullah, A., Azhar, M., Zulkifli, M., & Asshadiqi, F. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 2(1), 27–36.
- Syakhrani, A. W., Juhtratun, J., Nikmah, N., Mukarramah, M., & Hayati, N. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Perancis. *ADIBA: Journal of Education*, 2(3), 421–428.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164–178.
- Wahyuni, A. D., Sudyana, B., & Waldi, A. (2023). Pendidikan Karakter: Strategi Menghadapi Globalisasi. *Penerbit Tahta Media*.
- Widiasanti, I., Abdul, A. V., Nirwana, A., & Della Arlita, A. (2023). Ancaman Melawan Putus Sekolah Dengan Dilema Kualitas Pendidikan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2118–2126.
- Zubaidah, S. (2019). Pendidikan Karakter Terintegrasi Keterampilan Abad Ke-21. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.36312/e-saintika.v3i2.125>.

PROFIL PENULIS



Sri Atin, S.Pd., M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis mengabdikan diri sebagai guru honorer pada salah satu sekolah dasar di Ponorogo. Sambil mengajar, Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Ponorogo pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S1 lagi di prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan lulus pada tahun 2021. Tahun berikutnya, penulis melanjutkan lagi studi S2 pada prodi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, lulus pada tahun 2023 dengan predikat *cumlaude*. Penulis memiliki kepakaran dibidang pendidikan dan pembelajaran di tingkat sekolah dasar.

Untuk mewujudkan karir sebagai guru profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Sejumlah artikel ilmiah telah terpublikasi pada Jurnal Bereputasi Nasional Terindeks Sinta 2 salah satunya yaitu Jurnal Edukasi Kementerian Agama, Jurnal Sinta 3, 4 maupun Sinta 5. Artikel ilmiah yang telah ditulis diantaranya bertema pendidikan dan pembelajaran di tingkat dasar maupun Perguruan Tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Antologi Pendidikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sriatin789@gmail.com.

BAB 12

KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Randitha Missouri, M.Pd.

Universitas Muhammadiyah Bima

Latar Belakang dan Sejarah Program Pendidikan Gratis

Program pendidikan merupakan rangkaian kegiatan terencana dan terstruktur dalam mencapai tujuan pendidikan. Perancangan program pendidikan dilakukan mulai pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan pendidikan tinggi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup beberapa aspek seperti pembentukan karakter berbudi pekerti luhur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi individu, pemantapan ideologi dan nasionalisme, penyediaan tenaga kerja berkualitas, serta pengembangan sains dan teknologi.

(Dwi, 2023) menemukan beberapa masalah pendidikan di Indonesia yaitu: (1) akses pendidikan terbatas, (2) terjadinya ketimpangan pendidikan, (3) kurangnya kualitas guru dan tenaga pendidik, (4) tidak relevannya kurikulum yang diterapkan, (5) kurangnya kualitas sarana dan prasarana, (6) kesenjangan digital, dan (7) kurangnya kualitas ujian dan evaluasi. (Rahman et al., 2020) menemukan bahwa program pendidikan gratis tidak dapat diharapkan dalam meningkatkan kualitas sekolah.

Namun, pendidikan gratis dapat meningkatkan kuantitas partisipasi siswa di sekolah. Program pendidikan gratis berdampak terhadap rendahnya minat orangtua dan siswa mendukung peningkatan kualitas pendidikan karena memiliki mental peminta dan serba gratis.

Sejarah perkembangan program pendidikan gratis di Indonesia berawal pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Dibawah kepemimpinan presiden Soekarno Hatta konsep pendidikan gratis diadopsi untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Namun, program pendidikan pada masa ini terbatas dan tidak merata karena keterbatasan sumber daya. Tahun 1966-1998 pada masa orde baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, akses program pendidikan gratis diperluas melalui program wajib belajar 9 tahun.

Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah pertama (SMP). Meskipun pada masa orde baru program pendidikan bertujuan menjadi pendidikan gratis, namun masih terdapat biaya seperti seragam, pendaftaran, dan buku yang membebani keluarga kurang mampu (Romlah et al., 2023) menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pemerataan akses layanan pendidikan dan secara langsung berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Tahun 2005 pada masa reformasi pendidikan abad 21 di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuat program pendidikan gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diberikan secara langsung kepada pihak sekolah untuk menutupi biaya operasional dan sebagai biaya sekolah siswa tidak mampu. Program BOS merupakan langkah awal menuju pendidikan gratis meskipun program ini tidak dapat menghapus biaya sekolah secara langsung. Tahun 2015 dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo, pemerintah membuat program pendidikan gratis melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Program ini berupa pemberian biaya tunai kepada siswa, bantuan beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan lainnya. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang

kenyamanan belajar siswa dan berdampak pada meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara terus menerus perlu dilakukan.

6. Peningkatan Pengawasan Dan Evaluasi

Evaluasi terhadap proses *monitoring* dan evaluasi program pendidikan gratis harus dilakukan pemerintah dengan ketat. Lemahnya *monitoring* dan evaluasi memberi peluang pada pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan anggaran. Semakin meningkatnya kasus korupsi di bidang pendidikan menjadi atensi khusus bagi pemerintah dalam memperketat pengawasan dan evaluasi.

7. Kolaborasi Dengan Stakeholder Pendidikan

Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pencapaian tujuan program pendidikan gratis yaitu melalui kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan seperti kerjasama dengan perusahaan nasional dan internasional bidang pendidikan, pihak swasta, sekolah bertaraf internasional, dan industri kerja. Hal ini dilakukan selain untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan (beasiswa), juga menjadi wadah siswa mengembangkan diri melalui praktek langsung pada mitra pemerintah.

8. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kebijakan pemerintah dalam program pendidikan gratis juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan manfaat program pendidikan gratis. Hal ini dilakukan guna mendorong orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

9. Menambah Fokus Program Pada Pendidikan Inklusif

Program pendidikan gratis belum terlalu fokus pada pendidikan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap objek program pendidikan gratis, sehingga siswa berkebutuhan khusus juga dapat memperoleh hak yang sama.

Daftar Pustaka

- Dwi, A. (2023). *Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia*.
- Haba, M. R. (2020). *Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah*. 7, 102–115.
- Hasanah, A., Kantun, S., & Soepeno, B. (2019). The implementation of Free Educational Program (FEP) at MTs Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 243, 012062. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012062>.
- Rahman, A., Nasihin, A., Islam, A., Curup, N., Indonesia, B., & Bengkulu, U. (2020). *Mampukah Sekolah Gratis Mencapai Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan?* 9(1), 102–116. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>.
- Romlah, S., Imron, A., Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A Free Education Policy In Indonesia For Equitable Access And Improvement of The Quality On Learning Education Policy | Research Article A Free Education Policy In Indonesia For Equitable Access And Improvement of The Quality of Learning. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>.
- Usman, D. H., Sauri, S., & Fath, A. F. (2022). *Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan di Pesantren Fath*. 11(4), 589–600. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>.
- Valeev, A. A., & Valeeva, L. A. (2014). *ScienceDirect Free Education: Pro And Contra*. 131, 66–69. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.081>.
- Wirian, O., Agustina, N., & Siahaan, A. (2022). *Model-Model Pembiayaan Pendidikan*. 1(1), 44–56.
- Wolio, A., Saidah, U., & Rajab, L. (2022). *Hubungan Implementasi Biaya Pendidikan Gratis*. 1(1), 12–26.

PROFIL PENULIS



Randitha Missouri, M.Pd.

Seorang Penulis dan tenaga pendidik pada kampus Universitas Muhammadiyah Bima. Ketertarikan penulis pada bidang ilmu pendidikan dimulai sejak tahun 2006 silam, ketika menjuarai lomba karya ilmiah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lahir di Rabangodu Bima, 20 April 1992 Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Mataram Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta Prodi Manajemen Pendidikan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Samsurizal dan Ibu Siti Nurkasmir. Penulis mulai aktif menulis buku tahun 2023 dan ini merupakan buku ke empat. Penulis aktif sebagai peneliti di bidang pendidikan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Penulis aktif berkontribusi bagi masyarakat melalui pengabdian masyarakat dengan tujuan memajukan pendidikan di wilayah Kota Bima. Di samping ketertarikan terhadap ilmu pendidikan, penulis juga tertarik terhadap ilmu politik dan kepemiluan. Sejak 2019 sampai saat ini, penulis aktif sebagai penyelenggara pemilu ad hoc Bawaslu Kota Bima.

Email Penulis: randitha44@gmail.com.

BAB 13

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN

Kharisma Romadhon, M.Pd.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang sangat kompleks, melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pendidikan, terdapat elemen-elemen politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis, bahkan agama (Madjid, 2018). Karena itulah, pendidikan menjadi aspek yang sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Nurkholis & Santosa, 2022).

Berbagai kebijakan inisiasi dalam mengelola urusan kehidupan keagamaan muncul karena perbedaan pendapat tentang bagaimana negara dan agama seharusnya berinteraksi. Kelompok yang mendukung secara kuat mengungkapkan bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, serta mendorong penambahan simbol-simbol formal agama dalam struktur negara. Sedangkan kelompok yang menentang menginginkan pemisahan antara urusan agama dan negara, karena mereka percaya bahwa kedua hal tersebut memiliki prinsip yang berbeda (Mustofa, 2020).

memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, dan pemerintah diharapkan memperlihatkan peran yang lebih serius dalam mendukung pesantren. Tujuannya adalah agar cita-cita yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, dapat tercapai dengan sukses (Nuraeni, 2021).

Daftar Pustaka

- Burga, M. A., Arsyad, A., Damopolii, M., & Marjuni, A. (2019). Akomodasi Kebijakan Pendidikan Nasional Bagi Pondok Pesantren DDI Mangkoso. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 4(1).
- Damayanti, S. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pesantren Berbasis Manajemen Risiko. *Educandum: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2).
- Fachrudin, Y. (2021). Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Pesantren. *DIRASAH: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, 4(2).
- Ghobarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1).
- Hasanah, D. U., Alfi, A., & Kurniasih, D. (2021). Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 4(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v4i1.780>.
- Khairani, M., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2021). Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 86–95. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.705>

- Madjid, Abd. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Mustakim, M. (2020). Rekognisi Kebijakan Pemerintah terhadap Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 3(2), 28–41. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i2.336>.
- Mustofa, I. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1).
- Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Nurkholis, N., & Santosa, A. B. (2022). Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis Pesantren. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 7(2), 113–130. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v7i2.17023>.
- Nurochim, N. (2016). Sekolah Berbasis Pesantren sebagai Salah Satu Model Pendidikan Islam dalam Konsepsi Perubahan Sosial. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 69–88.
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Rahmi, A. (2019). Analisis Kebijakan Peraturan Bupati Solok Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3323>.
- Riyani, I. (2023). Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 32–51. <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>.

- Rohman, N., Rohman, F., Pramono, S. E., & Prihatin, T. (2023). *Model Kepemimpinan Kolektif dalam Pencapaian Visi Bersama pada Sekolah Berbasis Pesantren*. UNISNU Press.
- Saihu, M. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah, Madrasah, dan Pesantren*. Yapin An-Namiyah.
- Samudera, S. A. (2023). Undang-Undang Pesantren sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 2(2), 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Sugiyanto, N. W., & Santosa, S. (2021). Strategi Pemasaran Sekolah Berbasis Pesantren. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 90–115. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.105>.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Bab I Pasal I. (2019). [dataset].
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1).

PROFIL PENULIS



Kharisma Romadhon, M.Pd.

Lahir di Tulung Selapan pada tanggal 24 Januari 1997 adalah mahasiswa Program Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Sebelumnya melanjutkan Program Pascasarjana ia juga merupakan alumni PGMI juga di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016-2020. Ia pernah mengikuti organisasi HMPS di S1 dan juga mengikuti beberapa organisasi UKMK di antaranya organisasi Pencak Silat, Koperasi Mahasiswa, dan lain sebagainya. Penulis adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Sungai Pasir Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Riwayat pendidikannya yaitu pertama di SD Negeri 1 Sungai Pasir tempat ayahnya mengabdikan pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan SLTP di MTs Al-Ishlah Tulung Selapan tahun 2010-2013 dan langsung melanjutkan Madrasah Aliyah di Yayasan yang sama yaitu MA Al-Ishlah Tulung Selapan pada tahun 2013-2016. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di madrasahnyanya di antaranya kegiatan drumband, pramuka, ekskul olahraga, dan lain sebagainya. Di Madrasah Aliyah ia juga ikut Organisasi Santri yang disebut dengan ORSI atau OSIS pada umumnya, sampai akhirnya melanjutkan kuliah di UIN Raden Fatah Palembang lulus pada Desember 2020, kemudian melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus pada Desember 2023.

BAB 14

KEBIJAKAN BEASISWA

PENDIDIKAN

Jeremias Leda, S.T., M.Sc.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Beasiswa merupakan suatu bentuk bantuan ekonomi yang diberikan untuk membantu penerimanya, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menyelesaikan studinya. Permohonan beasiswa dapat diberikan melalui berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintah, yayasan, dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan pendidikan kepada individu yang memiliki kemampuan atau prestasi di bidang tertentu, namun mungkin juga menghadapi hambatan keuangan dalam membiayai pendidikan.

Secara umum, beasiswa merupakan kegiatan penyaluran bantuan bagi penerima dengan kemampuan finansial terbatas agar dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Beasiswa berperan besar dalam usaha mendorong dan meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia agar mencapai keunggulan, meningkatkan kesempatan menempuh pendidikan dan memberikan dampak penting bagi masyarakat.

Untuk memperoleh beasiswa, pihak pemberi beasiswa biasanya menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria-kriteria tersebut dapat meliputi keberhasilan akademis menggunakan

penilaian standar yang tinggi, keterampilan unik di bidang tertentu seperti olahraga, seni atau musik, manajemen, keterlibatan dalam masyarakat sosial, dan aspek finansial dan kondisi ekonomi. Apabila dinyatakan memenuhi syarat maka penerima beasiswa memperoleh berbagai manfaat seperti yang ditetapkan oleh pihak pemberi beasiswa, antara lain biaya kuliah, buku, alat tulis, dan biaya hidup sehari-hari.

Program beasiswa dapat saja memberikan kesempatan yang luas bagi penerimanya, seperti kesempatan magang, mentoring atau akses ke jaringan profesional yang memungkinkan peningkatan peluang karir di masa yang akan datang.



Gambar 14.1: Ilustrasi Beasiswa

Sumber: <http://pokohkidul.desa.id/berita/read/informasi-program-bantuan-siswa-miskin/>.

Dengan mendapatkan beasiswa, seseorang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani oleh beban finansial yang berat. Beasiswa juga dapat memberikan motivasi tambahan untuk meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan bakat dan minat, serta membantu membangun jaringan profesional dan akademik yang luas.

Penutup

Pemerintah telah menjalankan berbagai program beasiswa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Efektivitas implementasi kebijakan beasiswa memang masih perlu ditingkatkan namun demikian menurut data statistik Biro Pusat Statistik telah terjadi peningkatan pemerataan pendidikan nasional. Peran beasiswa pendidikan terhadap pembangunan nasional pun telah diuraikan dengan sangat jelas dan oleh karena itu kebijakan beasiswa pendidikan harus terlaksana berkesinambungan sekarang dan masa yang akan datang demi pencapaian tujuan bernegara yakni kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil makmur.

Daftar Pustaka

- Dalla, Difa Puspa, and Hipolitus Kristoforus Kewuel. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 52–59, <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>.
- Fakultas, Doktor, et al. *Kisah Inspiratif Profesor Dan Doktor Tantangan Dan Romantika Perjuangan*.
- Gelar, Pendidikan, and Pusbindiklatren Bappenas. (2018). *Panduan Karyasiswa*.
- Herlinawati, et al. *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. (2017), http://repositori.kemdikbud.go.id/15786/1/Kajian_Implementasi_Indonesia_pintar.pdf.
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2024). *Panduan Pendaftaran Beasiswa Reguler Tahun 2024*. <https://diktis.kemenag.go.id/penyetaraan>.
- Pendidikan, Kementerian, et al. (2012). *Program Beasiswa Unggulan 2012*.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Riset, Kementerian, et al. (2020). *Dalam Negeri Tahun 2020*. No. 021.
- Zaluchu, Fotarisman. (2014). *Bermimpilah Terus Bersekolah*. Suluh Indomedia Press, p. 114.

PROFIL PENULIS



Jeremias Leda, S.T., M.Sc.

Lahir di Ende-Flores, NTT, tanggal 14 Mei 1972. Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pembina Tingkat I (III/d). Bercapaian Sarjana Teknik (S.T.) di Universitas Atma Jaya Makassar tahun 1997, *Master of Science* (M.Sc.) di *Liverpool University* tahun 2005. Menjadi Tenaga Pengajar (Dosen) pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Makassar, SulSel, sejak tahun 2000. Pemenang Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Bersaing dan Hibah IbM. Tahun 2009-2013 diamanahkan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Makassar.

Email Penulis: jeremias.leda@gmail.com.

BAB 15

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR

Mudatsir, S.Pd., M.Pd.
Universitas Musamus

Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Konsep merdeka belajar, diperkenalkan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, menyoroti pentingnya kemerdekaan dan kemandirian dalam menetapkan metode pembelajaran yang optimal.. Kurikulum merdeka belajar memungkinkan sekolah untuk mengembangkan pola orientasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan berlandaskan kurikulum nasional.

Kurikulum ini bukanlah kurikulum baru, melainkan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan fokus luas tidak hanya pada siswa tetapi juga melibatkan semua unsur pendidikan. Salah satu perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya adalah inklusi mata pelajaran TIK. Kurikulum merdeka belajar mengembangkan mata pelajaran berdasarkan enam komponen ke pelajaran Pancasila:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Berkebinekaan global.
3. Bergotong royong.
4. Kreatif.
5. Bernalar kritis.
6. Mandiri.

Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, siswa dapat mengeksplorasi secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan demokrasi. Proyek ini melatih peserta didik untuk melakukan tindakan konkret sebagai respons terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan tahap belajar mereka.

Kurikulum merdeka belajar telah menjadi terobosan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah bagaimana kurikulum ini mampu menciptakan manajemen unggulan di sekolah-sekolah. Manajemen unggulan dalam konteks ini merujuk pada kemampuan sekolah dalam mengelola pembelajaran, sumber daya manusia, dan lingkungan belajar secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Pertama-tama, kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang dan mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini memungkinkan terciptanya program pembelajaran yang lebih relevan dengan realitas lokal dan kebutuhan global, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dan minatnya secara maksimal.

Kedua, kurikulum ini mendorong adanya kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam mengelola pembelajaran. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, manajemen pembelajaran di sekolah dapat lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil yang diinginkan.

Selain itu, kurikulum merdeka juga menekankan pada pengembangan kompetensi sosial dan kepemimpinan siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memperkuat keterampilan kepemimpinan siswa di masa depan. Peningkatan anggaran tersebut berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Penurunan jumlah siswa per kelas (rasio guru-siswa) dan peningkatan fasilitas serta infrastruktur di lembaga pendidikan (Beatty et.al, 2021). Namun, beberapa ukuran prestasi siswa belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85, 102436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Mudatsir, M., Ramli, R. B., & Mustakim, M. (2023). Optimalisasi Keterampilan Mengajar Guru Melalui Supervisi Klinis Kepala Sekolah Pendekatan Kolaboratif Era Merdeka Belajar. *ARSEN: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1(1), 39-49.
- R. Maulana. (2021). *Merdeka Belajar*. Kemendikbud. Retrieved from <https://repositori.kemdikbud.go.id/23565/1/Merdeka%20Belajar.pdf>

PROFIL PENULIS



Mudatsir, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Makassar, 11 November 1994. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Alm. H. Muhammad Rusdi dan Hj. Marawiah. Penulis mempunyai istri bernama Musyahidah. Penulis menyelesaikan studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2018. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Pendidikan dan Media Pembelajaran. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku yaitu “Profesi Keguruan: Menjadi Guru Transformatif di Era Merdeka Belajar (2023)” dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: mudatsir@unmus.ac.id.

BAB 16

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Universitas Semarang

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat c yang berisi terkait amanah yang diberikan pemerintah agar mengikhtiarkan sebuah model pendidikan nasional yang bertujuan agar masalah keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah peserta didik menjadi lebih menonjol sehingga kecerdasannya akan selaras dengan hal tersebut seperti yang diatur Undang-Undang. Dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi yang tertera dalam dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012, di mana menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan tinggi menyebutkan bahwa iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi sesuatu yang sangat ditekankan dalam sebuah proses belajar mengajar atau pendidikan.

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 diterangkan bahwa tujuan pendidikan tinggi yang intinya adalah adanya sifat atau karakter manusia yang mempunyai iman, taqwa, dan budi pekerti yang baik dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak meninggalkan masalah kesehatan fisik jasmaninya, dan seterusnya. Tujuan tersebut sangatlah mulia sehingga diperlukan sebuah proses dan konsep pendidikan yang benar-benar serius. Maka, empat unsur dalam pendidikan yaitu pertama adalah tujuan dan target pendidikan;

kedua adalah kurikulumnya; ketiga adalah program pendidikan; dan keempat adalah evaluasi pendidikan. Keempat unsur tadi seharusnya diselaraskan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan bersama (Husaini, 2015).

Pendidikan dalam sebuah tatanan masyarakat sangatlah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dari masyarakat tersebut, sebab pendidikan merupakan sebuah usaha dalam rangka menjaga kelestarian, mengarahkan serta memberikan nilai-nilai peradaban dan kebudayaan dalam segala aspek kehidupan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya (Suhartini, 2003).

Pendidikan dapat dimaknai laksana sebuah bangunan yang memiliki beragam komponen yang antara satu dengan yang lainnya dapat membangun sebuah sistem yang saling keterkaitan secara fungsional, diantaranya masalah komponen dasar, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, dan sebagainya. Namun, itu diperlukan landasan yang kuat dalam pendidikan, yaitu pemikiran filsafat tentang tuhan, manusia, masyarakat, alam semesta, ilmu pengetahuan, dan akhlak.

Pemikiran filsafat pendidikan bersifat universal, artinya akan ada di setiap zaman dalam bangsa-bangsa yang tentunya dimulai dari zaman klasik, pertengahan, dan modern. Namun, zaman dan tempat yang berbeda akan memunculkan pemikiran filsafat pendidikan yang memiliki keunikan tersendiri meskipun akan tampak persamaan dan perbedaannya (Nata, 2012).

Pendidikan dalam asal kata bahasa Inggris adalah *to educate* artinya memperbaiki moral dan mempertajam intelektual. Pendidikan merupakan seluruh rangkaian pengalaman belajar yang terjadi dalam kehidupan dalam segala lingkungan yang ada di sekelilingnya, sebab pendidikan adalah hidup itu sendiri (Kadir, 2012).

Kebijakan Pendidikan Agama dari Masa ke Masa

Kebijakan dalam segala aspek di Indonesia termasuk kebijakan aspek pendidikan memiliki struktur hirarki yang harus ditaati oleh semua pemangku kebijakan diantaranya pertama adalah UUD 1945, dalam pasal 31 ayat c disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan

Pengadilan agama menjadi sebuah badan peradilan yang sangat mendasar dan tidak sama dengan sebelumnya, diantaranya pertama adalah bahwa pengadilan agama sudah menjadi peradilan mandiri yang sama kedudukannya dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara; kedua bahwa nama, susunan, dan wewenang serta hukum acara peradilan agama memiliki kesamaan di seluruh Indonesia.

ketiga bahwa perlindungan akan perempuan semakin ditingkatkan dengan diberikannya hak yang sama kepada seorang istri dalam membela dan berproses demi kepentingannya dalam pengadilan agama; keempat adalah dalam rangka memantapkan usaha dalam menggali beragam asas dan kaidah hukum dengan yurisprudensi sebagai acuan dalam menyusun dan pembinaan hukum nasional; dan kelima adalah mewujudkan hukum nasional yang memiliki corak Bhineka Tunggal Ika yang diwujudkan dalam bentuk UU peradilan agama.

Daftar Pustaka

- Ali, D. (1993). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Aminudin. (2005). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Arifin, H. . (2016). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. PT Bumi Aksara.
- Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional*. Gama Media.
- Daulay, H. P. (2004). *Pendidikan Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.

- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Husaini, A. (2015). *10 Kuliah Agama Islam*. Pro U Media.
- Kadir, A. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan*. Kencana Prenda Media Group.
- Majid, A. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Rekontruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Raja Grafindo Persada.
- Nata, A. (2012). *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- R, A. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *Yudisia*, 6(2), 16.
- Suhartini, A. (2003). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga pendidikan Islam Klasik*. Angkasa.
- Tresno. (1957). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Versluys.

PROFIL PENULIS



Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.

lahir di kota Semarang, 12 Mei 1981, sebagai anak seorang guru agama Islam dengan latar belakang pendidikan formal S1 di Universitas Islam Negeri Semarang dan menyelesaikan S2 di Universitas Sultan Agung jurusan Pendidikan Agama Islam Semarang dan kini tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah mengenyam atau nyantri di Pondok Pesantren Darul Ma' wa Suburan, Mranggen Demak sambil mengikuti pendidikan formal di SMP Futuhiyyah dan Madrasah Aliyah Futuhiyyah. Pengalaman mengajar dengan Jenjang karir dimulai menjadi guru SD, SMP, SMA dan kini menjadi Dosen Mata Kuliah Agama Islam di salah satu kampus di kota Semarang. Beberapa hasil tulisan baik dalam jurnal dan buku yang sudah terbit menjadi salah satu keinginan dan harapan yang besar bagi penulis serta sebagai sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam.

Email Penulis: rico.setyo.nugroho@gmail.com.

BAB 17

METODE PENELITIAN DAN RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Giandari Maulani, S.Kom., M.Kom.
STIE Putra Perdana Indonesia (PPI)

Konsep Dasar Metode Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan

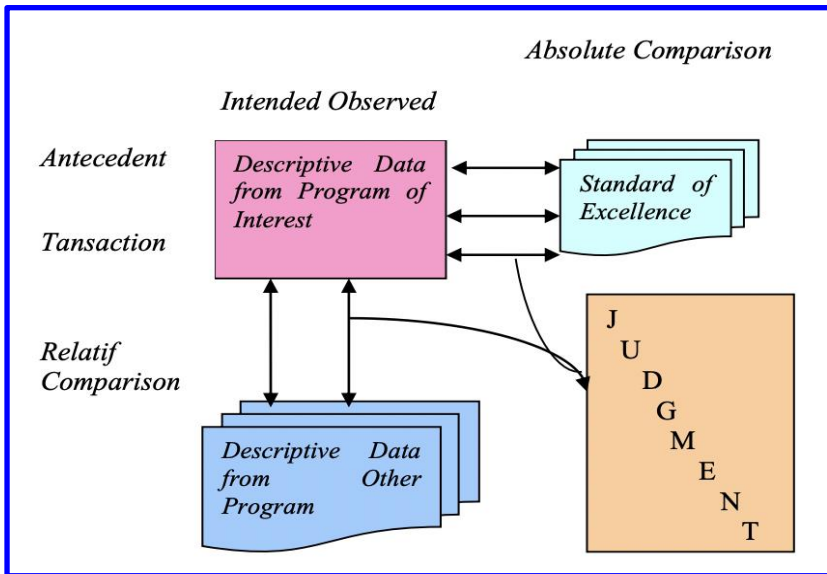
Metode Penelitian adalah Suatu cara dan pendekatan dari suatu sistem yang teratur/sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis serta menafsirkannya agar dapat menjawab hal yang berhubungan dengan berbagai *Question*/Pertanyaan yang timbul dalam penelitian, selain itu dapat juga untuk menjawab suatu pengujian hipotesis (M. Singarimbun & S. Effendi. 1995).

Metode Penelitian Pendidikan merupakan Cara ilmiah di dalam memperoleh Data-data Valid yang tujuannya untuk menemukan, mengembangkan serta membuktikan sesuatu atau membuktikan pengetahuan tertentu, yang dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah ataupunantisipasi masalah yang dapat terjadi di dalam dunia pendidikan (Arifin, Z. 2020).

Riset/*research*/penelitian adalah suatu *effort*/upaya pencarian, penyelidikan, percobaan, pengujian sesuatu untuk menemukan ilmu dan pengetahuan baru. Penelitian juga merupakan hal untuk memahami sesuatu, untuk memecahkan masalah tertentu secara ilmiah, empiris, sistematis dan logis (Irmawartini, I. & Nurhaedah, N. 2017).

5. Metode Penelitian *Responsive Evaluation*

Metode penelitian *responsive evaluation* ini diusung oleh Robert Stake, yang tertulis pada *paper*-nya yang berjudul: ‘*The Countenance of Educational Evaluation*’ yang dipublikasikan di tahun 1967. Metode penelitian *responsive evaluation* ini diterapkan untuk evaluasi formatif jika terdapat kasus/*case* suatu program yang ternyata tidak memperoleh hasil yang optimal. Informasi yang diperlukan di dalam metode penelitian *responsive evaluation* ini haruslah rasional, memiliki *antecedent*/pendahuluan atau input, adanya *transaction*/transaksi atau proses serta harus memiliki hasil atau produk (Mulyatiningsih, E. 2011). Di dalam metode penelitian *responsive evaluation* ini terdapat proses pengambilan keputusan yang diilustrasikan oleh Robert Stake pada Gambar 17.3 di bawah ini:



Gambar 17.3: Proses Pengambilan Keputusan Menurut Robert Stake

Sumber: Madaus, G.F, Scriven, M.S & Stufflebeam, D.L. (1986: 224).

Daftar Pustaka

- Akhmadi, N. (2011). Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia. *Prosiding The SMERU Research Institute*. Hal.515.
- Anwar, M.E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 (1), 483-496.
- Arifin, Z. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 1 (1). STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.
- Hasbullah, H.M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
- Irmawartini, I. & Nurhaedah, N. (2017). *Metodologi Penelitian. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Badan pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Edisi Tahun 2017.
- Madaus, G.F, Scriven, M.S & Stufflebeam, D.L. (1986). *Evaluation Model, Viewpoint on Educational And Human Service Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 16 (1), 71-80.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan*.
- Singarimbun, M & Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Penerbit LPPES Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik; Proses dan Analisis*. Penerbit Intermedia Jakarta.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

PROFIL PENULIS



Giandari Maulani, S.Kom., M.Kom.

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada Universitas Budi Luhur Jakarta dengan jurusan Teknologi Sistem Informasi. Saat ini Penulis bekerja sebagai Kaprodi (Ketua Program Studi) dan Dosen Tetap (berstatus Sertifikasi Dosen) pada STIE Putra Perdana Indonesia (PPI) Tangerang dan memiliki 2 (dua) pekerjaan *online* lainnya.

Penulis memiliki pengalaman menulis antara lain: Pernah mendapatkan Hibah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2021 senilai Rp. 49.000.000, pernah mendapatkan Juara III Tingkat Nasional Lomba Karya Tulis Inovatif (LKTI) Bidang Pemerintahan di tahun 2021 dan saat ini Penulis memiliki 64 (enam puluh empat) *paper* yang telah terpublikasi pada berbagai Jurnal Nasional dengan 5 (Lima) *International Journal* terindeks Scopus selama rentang tahun 2015-2023.

Mulai Pertengahan tahun 2023 sampai dengan Sekarang Penulis aktif membuat Buku Kolaborasi dalam berbagai bidang, antara lain: Bidang Komputer, Bidang Pendidikan, Bidang Manajemen, Bidang Ekonomi, dll. Buku-buku kolaborasi tersebut antara lain:

1. Buku Seni dan Sains CNC DIY: Jembatan Kreativitas dan Teknologi Mesin.
2. Buku Pendidikan Inklusi.
3. Buku Manajemen Mutu Pendidikan.
4. Buku *Micro Teaching* (Teoritis & Praktis).
5. Buku Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Buku Pendidikan Multikultural.
7. Buku Bidang IT Fundamental Algoritma.
8. Buku Komunikasi Pendidikan.

9. Buku Revolusi Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM.
10. Buku Manajemen Strategi Menghadapi Industri 5.0.
11. Buku Analisa Sistem.
12. Buku Pemanfaatan dan Penerapan *Internet of Things/IoT* di Berbagai Bidang.
13. Buku Komputer dan Masyarakat.
14. Buku Interaksi Manusia & Komputer.
15. Buku *Development of Artificial Intelligence Applications*.
16. Buku Penerapan *Data Mining* di berbagai Bidang.
17. Buku Rekayasa Perangkat Lunak.
18. Buku Konsep Dasar Bisnis Internasional.
19. Buku Manajemen Pelayanan Publik.
20. Buku Transformasi Metodologi Pembelajaran.
21. Buku Manajemen Pendidikan Tinggi.
22. Buku Kebijakan Pendidikan.
23. Buku Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
24. Buku Revitalisasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Era 5.0.
25. Buku *Exploring The Power of Big Data and Data Analytics for Tomorrow's Insight*.
26. Buku Pendidikan Kewarganegaraan.
27. Buku Manajemen Keuangan Internasional.
28. Buku Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Masa Society 5.0.

Email Penulis: maulanigiandari@gmail.com.

BAB 18

MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Muhammad Alwi, M.Pd.

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan beragam dimensi kehidupan manusia. Dalam hal ini, tidak hanya aspek-aspek langsung seperti pengajaran dan pembelajaran yang terlibat, tetapi juga dimensi-dimensi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pendidikan itu sendiri. Dimensi politik hadir dalam bentuk kebijakan dan regulasi pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara dimensi ekonomi memainkan peran penting dalam aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, termasuk infrastruktur dan biaya pendidikan.

Aspek hukum memastikan bahwa hak-hak pendidikan setiap individu terlindungi dengan adil dan merata. Dimensi sosial dan budaya mempengaruhi kurikulum dan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Kesehatan dan psikologi berperan dalam memastikan kesejahteraan mental dan fisik siswa, sementara dimensi sosiologis menyoroti interaksi antara individu dalam lingkungan pendidikan.

Bahkan agama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan dalam proses pendidikan. Oleh

yang telah diterapkan dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja kebijakan di masa mendatang.

Dengan melakukan evaluasi secara teratur dan sistematis, dapat membuka pintu ke dalam dunia kompleks kebijakan, membedah setiap elemen untuk memahami dampaknya secara holistik. Evaluasi menjadi cermin yang memantulkan kembali gambaran yang jelas tentang kebijakan pendidikan, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat seberapa jauh kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya dan di mana ada ruang untuk perbaikan (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, n.d.).

Dalam siklus evaluasi yang berkelanjutan ini, setiap langkah bukan hanya tugas yang harus diselesaikan, tetapi juga kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, siklus evaluasi menjadi alat yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk mengarahkan perjalanan kebijakan pendidikan menuju kesuksesan yang lebih besar dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, K. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2020). Evaluation of The Zonation System Implementation of New Student Acceptance. *Akademika*, 9(02), 81–103. <https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.837>.
- Anisa Sukma Wantari. (n.d.). *Reinforcement of Islamic Education Institution Policy In Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta*. Jurusan Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dewi, A. O. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sleman Tahun 2018*.

- Dr. Dian, M.Ag., et al. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)*. (Cetakan Pertama, Desember 2021). Farha Pustaka Anggota IKAPI Nomor 376/JBA/2020.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.I.P, M.Si. (n.d.). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Cetakan Pertama, November 2015). Leutikaprio, Jl. Wiratama No. 50, Tegalrejo, Yogyakarta, 55244.
- Fuadi, K., Sudjanto, B., & Kamaluddin, K. (2018). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kementerian Agama. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.20714>.
- Gayatri, Y., Dewi, D. R., & Ainy, C. (2015). *Implementasi Monitoring dan Evaluasi Proses Lesson Study Di FKIP UM Surabaya*. 15(1).
- Hermuttaqien, B. P. F. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Akademik dan Non Akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*.
- Kusuma, N., Yani, Y., Agustian, H., Sholihannisa, L. U., Alwi, M., Putra, A. A. W., & Arribathi, A. H. (n.d.). *Transformasi Administrasi Pendidikan*.
- Madjid, D. A. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pendidikan*.
- Muhammad Alwi. (n.d.). *Ilmu Pendidikan*. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. 1(1).
- Septiani, S., Surachman, A. E., Alwi, M., Missouri, R., Tuerah, P. R., Arribathi, A. H., Hadikusumo, R. A., Saptadi, N. T. S., Halimah, A. H., Desilawati, A., Maulani, G., & Tuerah, R. M. S. (n.d.). *Manajemen Mutu Pendidikan*.
- Yesi Merinda, Riswanti Rini, Sowiyah. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat*. FKIP Unila.

PROFIL PENULIS



Muhammad Alwi, M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu pendidikan dimulai pada tahun 2012 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan berhasil lulus pada tahun 2017. Selama kuliah penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan mulai dari organisasi intra kampus sampai dengan organisasi ekstra kampus, selama menjadi aktivis di kampus penulis banyak melakukan kajian-kajian pendidikan dan mengadvokasi isu-isu pendidikan.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana Prodi Administrasi Pendidikan Konsentrasi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di IAIN Parepare. Penulis memiliki ketertarikan di bidang manajemen pendidikan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang disiplin keilmuannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan swadaya mandiri. Selain meneliti, penulis juga aktif menulis opini di media *online* dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: alwimuhammad562@gmail.com.

Kebijakan Pendidikan



Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan maju dan perkembangannya kualitas pendidikan atau sebaliknya. Buku Kebijakan pendidikan ini mengelaborasi para pembaca untuk memahami lebih dalam tentang urgensi kebijakan dalam bidang pendidikan agar cita-cita pendidikan dapat terwujud dengan lebih optimal. Dalam buku ini pembaca tidak hanya disuguhkan tema kebijakan pendidikan dalam konteks konseptual saja, namun juga dilengkapi dengan berbagai topik dan isu-isu kebijakan pendidikan beserta detail *best practice* nya. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, akademisi, praktisi pendidikan serta para pengamat pendidikan. Dengan membaca buku ini akan memperkaya wawasan pembaca mengenai kebijakan-kebijakan dalam ranah pendidikan. Dalam buku ini terdapat delapan belas bab terdiri dari:

1. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan
2. Isu-Isu Kebijakan Pendidikan
3. Perumusan Kebijakan Pendidikan
4. Implementasi Kebijakan Pendidikan
5. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah
6. Kebijakan Pendidikan Berkarakter Kebangsaan
7. Kebijakan Pendidikan Inklusi
8. Kebijakan Guru dan Dosen
9. Kebijakan Kurikulum dan Buku Teks Pembelajaran
10. Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru
11. Kebijakan Program Wajib Belajar
12. Kebijakan Program Sekolah Gratis
13. Kebijakan Pendidikan Berbasis Pesantren
14. Kebijakan Beasiswa Pendidikan
15. Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar
16. Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan
17. Metode Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan
18. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan